

# AKUNTANSI PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH

---

Tim Penulis:

Rizka | Warka Syachbrani | Masdar Ryketeng  
Rifki Abdul Malik | Dahlia Tri Anggraini  
Nurafni Oktaviyah | Dede Riswandi | Siti Hartinah  
Iyak Solihat | Ade Elza Surachman | Tuti Meutia  
Rizky Ridwan | Agus Kurniawan

Editor : Rizka Mukhlisiah



# **AKUNTANSI PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH**

**Rizka**

**Warka Syachbrani**

**Masdar Ryketeng**

**Rifki Abdul Malik**

**Dahlia Tri Anggraini**

**Nurafni Oktaviah**

**Dede Riswandi**

**Siti Hartinah**

**Iyak Solihat**

**Ade Elza Surachman**

**Tuti Meutia**

**Rizky Ridwan**

**Agus Kurniawan**



# AKUNTANSI PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH

## Tim Penulis:

Rizka  
Warka Syachbrani  
Masdar Ryketeng  
Rifki Abdul Malik  
Dahlia Tri Anggraini  
Nurafni Oktaviah  
Dede Riswandi  
Siti Hartinah  
Iyak Solihat  
Ade Elza Surachman  
Tuti Meutia  
Rizky Ridwan  
Agus Kurniawan

**Editor** : Rizka Mukhlisiah, S.E., M.Si.  
**Tata Letak** : Asep Nugraha, S.Hum.  
**Desain Cover** : Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.  
**Ukuran** : UNESCO 15,5 x 23 cm  
**Halaman** : vii, 202  
**ISBN** : 978-634-7021-09-0  
**Terbit Pada** : Desember 2024  
**Anggota IKAPI** : No. 073/BANTEN/2023

## Hak Cipta 2024 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

*Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.*

## PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang-Banten  
Email : sadapenerbit@gmail.com  
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com  
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat-Nya, buku "Akuntansi Pemerintahan Pusat dan Daerah" ini dapat terwujud. Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman mendalam tentang panduan komprehensif yang membahas secara mendalam konsep, prinsip, dan praktik akuntansi yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Buku ini dirancang untuk membantu pembaca memahami mekanisme pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan keuangan di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku.

Melalui pembahasan yang sistematis, buku ini menguraikan topik penting seperti konsep dasar akuntansi pemerintahan, tujuan, prinsip, dan contoh akuntansi pemerintah, standar akuntansi, sistem akuntansi, penyusunan laporan keuangan, pendapatan belanja, pengelolaan APBN dan APBD, laporan keuangan BLU dan arus kas operasional, catatan atas laporan keuangan, akuntansi konstruksi, kebijakan akuntansi persediaan, serta pengukuran kinerja keuangan pemerintah pusat dan daerah. Pembaca juga diajak untuk memahami pentingnya harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami dan didukung oleh referensi terkini, buku ini sangat cocok digunakan oleh mahasiswa, praktisi akuntansi, aparatur sipil negara, dan siapa saja yang ingin mendalami akuntansi pemerintahan. Dengan pendekatan yang teoritis sekaligus praktis, buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan utama dalam memahami tata kelola keuangan pemerintah yang profesional dan bertanggung jawab.

Tim Penulis


# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB 1 AKUNTANSI PEMERINTAHAN: KONSEP DAN PRAKTIK DI PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH</b> .....	<b>1</b>
Pendahuluan .....	2
Asal Usul Lahirnya Akuntansi Sektor Publik .....	2
Pengertian Akuntansi Sektor Publik.....	3
Jenis-Jenis Akuntansi Sektor Publik.....	4
Tujuan dan Karakteristik Akuntansi Sektor Publik.....	7
Konsep <i>Value For Money</i> .....	9
Konsep <i>Good Governance</i> .....	10
Daftar Pustaka .....	14
Profil Penulis .....	16
<b>BAB 2 TUJUAN, PRINSIP, DAN CONTOH AKUNTANSI PEMERINTAH</b> .....	<b>17</b>
Pendahuluan .....	18
Tujuan Akuntansi Pemerintahan .....	19
Prinsip Akuntansi Pemerintahan .....	22
Contoh Akuntansi Pemerintahan .....	27
Kesimpulan .....	28
Daftar Pustaka .....	30
Profil Penulis .....	31
<b>BAB 3 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP)</b> .....	<b>32</b>
Pendahuluan .....	33
SAP Berbasis Akrual .....	34
Pokok-pokok Penting Penerapan SAP Berbasis Akrual.....	38
Daftar Pustaka .....	44
Profil Penulis .....	45
<b>BAB 4 SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH</b> .....	<b>46</b>
Pendahuluan .....	47
Perkembangan Akuntansi Pemerintah di Indonesia .....	48
Pengembangan Sistem Akuntansi Pemerintah.....	50

Dasar Hukum Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat .....	51
Tujuan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat .....	51
Perkembangan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat .....	52
Ruang Lingkup Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat .....	53
Daftar Pustaka .....	56
Profil Penulis .....	57
<b>BAB 5 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH .....</b>	<b>58</b>
Pendahuluan .....	59
Siklus Akuntansi Pemerintah .....	59
Basis Laporan Keuangan .....	61
Komponen Laporan Keuangan .....	62
Daftar Pustaka .....	68
Profil Penulis .....	69
<b>BAB 6 PENDAPATAN DAN BELANJA DALAM AKUNTANSI PEMERINTAHAN .....</b>	<b>70</b>
Pendahuluan .....	71
Pendapatan Dalam Akuntansi Pemerintahan .....	72
Belanja Dalam Akuntansi Pemerintahan .....	77
Daftar Pustaka .....	85
Profil Penulis .....	86
<b>BAB 7 PENGELOLAAN APBN DAN APBD .....</b>	<b>87</b>
Pendahuluan .....	88
Pengertian APBN dan APBD .....	88
Dasar Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Negara .....	89
Kebijakan Fiskal Sebagai Instrumen Utama .....	90
Pengelolaan dan Pengawasan APBN .....	92
Penyusunan dan Penetapan APBD .....	94
Pengelolaan dan Pengawasan APBD .....	95
Tantangan dan Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan APBN dan APBD .....	97
Kesimpulan .....	98
Daftar Pustaka .....	99
Profil Penulis .....	101
<b>BAB 8 LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU) .....</b>	<b>102</b>
Pendahuluan .....	103

Definisi dan Karakteristik Badan Layanan Umum (BLU).....	104
Akuntansi Badan Layanan Umum.....	105
Tujuan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum .....	107
Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.....	108
Periode Pelaporan Keuangan.....	127
Daftar Pustaka.....	130
Profil Penulis.....	131
<b>BAB 9 LAPORAN ARUS KAS DAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)</b>	<b>132</b>
.....	
Laporan Arus Kas.....	133
Arus Kas Untuk Operasional (OCF).....	134
Kas dan Setara Kas .....	135
Laporan Operasional.....	140
Daftar Pustaka .....	143
Profil Penulis .....	144
<b>BAB 10 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) .....</b>	<b>145</b>
Pendahuluan .....	146
Definisi Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).....	146
Ketentuan Umum Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) ..	148
Struktur dan Isi Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) .....	149
Kebijakan Akuntansi.....	149
Penyajian Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.....	151
Pengungkapan Informasi Tambahan Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.....	153
Daftar Pustaka.....	155
Profil Penulis.....	156
<b>BAB 11 AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan.....</b>	<b>157</b>
Definisi Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	158
Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) .....	160
Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) .....	163
Penyajian dan Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) .....	165
Daftar Pustaka.....	168
Profil Penulis.....	169

<b>BAB 12 KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH .....</b>	<b>170</b>
Pendahuluan .....	171
Definisi dan Klasifikasi Persediaan .....	171
Pengakuan Persediaan dan Beban Persediaan .....	172
Pengukuran Persediaan .....	173
Sistem Pencatatan Persediaan.....	174
Penyajian dan Pengungkapan Persediaan .....	175
Contoh Tabel Penyajian Persediaan Pemerintahan.....	177
Kebijakan Akuntansi Persediaan Berdasarkan PSAP Nomor 05 .....	177
Pengukuran Persediaan Berdasarkan PSAP Nomor 05 .....	178
Sistem Pencatatan Persediaan Berdasarkan PSAP Nomor 05 .....	179
Implikasi Kebijakan Akuntansi Persediaan.....	179
Daftar Pustaka.....	181
Profil Penulis.....	183
<b>BAB 13 ANALISIS PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH .....</b>	<b>184</b>
Pendahuluan .....	185
Dasar-Dasar Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah .....	187
Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah.....	191
Metode dan Teknik Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah ...	195
Tantangan Dalam Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah .....	199
Daftar Pustaka.....	201
Profil Penulis.....	202



**BAB 1**  
**AKUNTANSI**  
**PEMERINTAHAN:**  
**KONSEP DAN PRAKTIK**  
**DI PEMERINTAHAN**  
**PUSAT DAN DAERAH**

---

**Rizka, S.E., M.Si.**  
Universitas Serambi Mekkah



## Pendahuluan

Akuntansi pemerintahan dirancang untuk mencatat dan mengelola keuangan sektor publik guna mendukung layanan masyarakat dan menjaga transparansi. Berbeda dari sektor swasta yang fokus pada laba, sektor publik bertujuan memenuhi kesejahteraan publik dan didanai dari pajak serta hibah, dengan pertanggungjawaban yang lebih kompleks.

Struktur kelembagaannya lebih birokratis, dan anggarannya disusun berdasarkan prioritas publik. Sektor publik menggunakan standar akuntansi yang memastikan transparansi bagi masyarakat, sehingga akuntansi pemerintahan berperan penting dalam tata kelola dan akuntabilitas penggunaan dana publik.

Sektor publik saat ini dituntut untuk meningkatkan kualitas, profesionalisme, dan penerapan *value for money*, yang mencakup ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya. Akuntabilitas publik dan *good governance* juga menjadi prioritas, guna memastikan transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana publik untuk memberikan nilai terbaik bagi masyarakat.

## Asal Usul Lahirnya Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah proses pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan dalam organisasi sektor publik, terutama pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan pengelolaan dana publik secara efektif dan transparan, berfokus pada penyediaan layanan kepada masyarakat, bukan pada keuntungan.

Akuntansi sektor publik berbeda dari sektor swasta dalam hal sifat, tujuan, lingkungan operasional, dan standar yang digunakan (Siregar, 2015). Standar akuntansi yang diterapkan di sektor publik, seperti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) atau Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional (IPSAS), dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelaporan yang spesifik bagi entitas publik.

Sejak awal 1990-an, banyak negara beralih dari model pemerintahan formal (*ruling government*) ke tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Pergeseran ini bertujuan meningkatkan

g. Efektifitas dan Efisiensi

Prinsip ini menuntut pemerintah untuk mencapai hasil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sambil menggunakan sumber daya secara optimal. Efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan, sedangkan efisiensi berfokus pada penggunaan sumber daya yang hemat.

h. Akuntabilitas

Akuntabilitas mengharuskan pengambil keputusan bertanggung jawab atas tindakan mereka kepada masyarakat dan lembaga terkait. Hal ini menciptakan transparansi dan membangun kepercayaan publik terhadap institusi.

i. Visi Strategis

Visi strategis mengacu pada kemampuan pemimpin dan masyarakat untuk merencanakan masa depan dengan memahami kebutuhan dan tantangan yang ada. Visi ini penting untuk merumuskan kebijakan yang berkelanjutan dan responsif terhadap perubahan, serta untuk memandu perkembangan yang inklusif.

## 2. Pilar-Pilar *Good Governance*

Pemerintahan yang baik atau *Good Governance* hanya bermakna jika dijalankan oleh lembaga yang melibatkan kepentingan publik.

Artinya, pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat hanya dapat tercapai jika lembaga-lembaga yang menjalankannya memberi peran serta dan mendengarkan suara publik. Jenis lembaga tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pemerintah Daerah (*Good Public Governance*)

- 1) Menjaga stabilitas politik, ekonomi, dan sosial demi iklim yang kondusif.
- 2) Menyediakan layanan publik yang berkualitas dan transparan.
- 3) Membuat peraturan yang adil dan efektif bagi semua warga.
- 4) Melindungi lingkungan hidup melalui kebijakan yang berkelanjutan.

- 5) Menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk melindungi hak dasar masyarakat.
  - 6) Menjaga standar kesehatan dan keselamatan publik.
- b. Sektor Swasta (*Good Corporate Governance*)
- 1) Memberikan insentif kepada karyawan.
  - 2) Menciptakan lapangan kerja.
  - 3) Melestarikan lingkungan hidup.
  - 4) Meningkatkan standar hidup masyarakat.
  - 5) Mematuhi peraturan.
  - 6) Menyediakan kredit untuk pengembangan UKM.
  - 7) Mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Masyarakat Madani (*Civil Society*)
- 1) Melindungi hak masyarakat
  - 2) Mengawasi penyalahgunaan kekuasaan
  - 3) Mempengaruhi kebijakan publik
  - 4) *Checks and balances* pemerintah
  - 5) Mengembangkan sumber daya manusia
  - 6) Sarana komunikasi

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Bastian, Indra. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Dr. Baldric Siregar, M.B.A., CMA., CA., Ak. (2015). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual) Edisi Pertama*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Halim, Abdul dan M. Syam Kusufi. (2021). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik edisi ke-2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Haryanto, Sahmuddin, dan Arifuddin. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Pertama*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- IKAPI. (2009). *Standar Akuntansi Pemerintahan: Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005*. Bandung: Fokus Media.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2010). PSAK 45: Akuntansi Organisasi Nirlaba. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Jamaluddin Majid. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Gowa-Sulawesi Selatan: Penerbit Pusaka Almaida.
- Mahmudi (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi 3*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahsun, Moh, Firma Sulistiwyaty, dan Andre Purwanugraha. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPEE Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mitoyo, (2017). *Akuntansi Nirlaba*, <http://Fajartriatmojo.wordpress.com>.
- Noerdiawan, D. Dan A. Hertianti. (2011). *Akuntansi Sektor Publik. Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Noerdiawan, Deddi, Iswahyudi Sondi Putra dan Maulidah Rahmawati. (2012). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.
- PMK 233 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No 171/Pmk.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

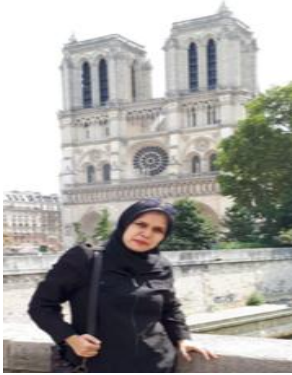
Renyowijoyo, Muindro. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba, Jilid 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

SAP Berbasis Akrua Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Sujarweni, V. Wiratna. (2005). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 230-235.

## PROFIL PENULIS




### **Rizka, S.E., M.Si.**

Penulis merupakan lulusan pada Program Magister Universitas Syiah Kuala jurusan Akuntansi, Penulis merupakan dosen tetap tersertifikasi di Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Serambi Mekkah Aceh. Berbekal pada pengalaman kerja sebelumnya sebagai akuntan dari tahun 2004 hingga 2017 di RTI *Internasional Development Program USAID DBE-1* dan program USAID Prioritas Aceh serta pengalaman organisasi sebagai pengurus Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia (ADAI) DPW Aceh dari tahun 2018 hingga sekarang, menjadikan awal mula untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional.

Penulis pun aktif sebagai peneliti, yang mana beberapa penelitiannya dilakukan didanai oleh Kemendikbud Ristek DIKTI. Penulis pun aktif menulis berbagai buku dan berbagi ilmu serta pengalaman dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang tercinta ini. Sebelumnya penulis pernah membuat buku dengan judul *Akuntansi Keuangan Menengah; Sesuai PSAK dan IFRS, Membangkitkan Semangat entrepreneurship Sejak Usia Dini: Kiat Sukses dengan Semangat nilai-nilai Ke-Acehan, Pengantar Ekonomi (Mikro Dan Makro), Pengantar Bisnis, Pengantar Akuntansi, Akuntansi Perusahaan Jasa Dan Dagang, Sejarah Dan pemikiran Ekonomi Islam, dan Pengembangan Semangat Usaha Wisata: Melalui Potensi Alam dan Kearifan Lokal*, yang digunakan sebagai referensi pada proses belajar mengajar di perguruan tinggi tempat penulis berafiliasi.

Email Penulis: [rizka@serambimekkah.ac.id](mailto:rizka@serambimekkah.ac.id).



# **BAB 2**

# **TUJUAN, PRINSIP, DAN**

# **CONTOH AKUNTANSI**

# **PEMERINTAH**

---

**Warka Syachbrani, S.E., M.Sc., Ak., CA.**  
Universitas Negeri Makassar



## Pendahuluan

Akuntansi pemerintah memegang peranan penting dalam menciptakan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam konteks pengelolaan keuangan publik, akuntansi pemerintah berfungsi sebagai alat untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai penggunaan sumber daya keuangan negara.

Hal ini sangat penting mengingat bahwa dana publik merupakan hasil dari kontribusi masyarakat yang diharapkan dikelola dengan baik demi kepentingan bersama. Menurut Agyemang dan Unerman (2016), bahwa Akuntansi pemerintahan adalah instrumen kunci yang memungkinkan pengawasan dan akuntabilitas terhadap pengelolaan sumber daya publik.

Transparansi dalam akuntansi pemerintah memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan memahami bagaimana dana publik digunakan. Ketika pemerintah menyediakan informasi yang terbuka dan mudah diakses, masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pengawasan, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Di sisi lain, akuntabilitas menuntut pejabat publik untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dan memastikan bahwa setiap pengeluaran memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Sebagaimana dinyatakan oleh Kettunen dan Kallio (2018), bahwa Akuntabilitas publik merupakan fondasi dari kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang hanya dapat tercapai melalui praktik akuntansi yang baik dan transparan.

Tujuan penulisan *chapter* ini adalah untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai tujuan dan prinsip akuntansi pemerintah, serta memberikan contoh konkret tentang penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik. Dengan memahami landasan dan implementasi akuntansi pemerintah, diharapkan pembaca dapat melihat betapa pentingnya fungsi akuntansi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mendorong pengelolaan keuangan publik yang lebih baik. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik akuntansi pemerintah di Indonesia.

## Tujuan Akuntansi Pemerintahan

### 1. Transparansi dan Akuntabilitas

Akuntansi pemerintahan memiliki tujuan utama yang sangat penting, yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Transparansi mengacu pada praktik menyediakan informasi yang jelas, terbuka, dan mudah diakses mengenai penggunaan dana publik.

Dalam konteks ini, akuntansi pemerintah berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana dana yang dikumpulkan dari pajak dan sumber lainnya digunakan. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat melihat secara langsung alokasi anggaran, realisasi belanja, dan hasil dari setiap program atau proyek yang dilaksanakan.

Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa transparansi adalah kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Friedman, 2017). Di sisi lain, akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban pejabat publik untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik kepada masyarakat. Setiap keputusan dan tindakan yang diambil dalam pengelolaan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan dapat diterima. Akuntansi yang baik memberikan dasar yang kuat untuk akuntabilitas, memungkinkan pemangku kepentingan untuk menilai kinerja dan efektivitas pengeluaran pemerintah.

Seperti yang diungkapkan oleh Kettunen dan Kallio (2018), Akuntabilitas publik tidak hanya tentang laporan keuangan, tetapi juga tentang bagaimana informasi tersebut digunakan untuk mendorong tindakan yang bertanggung jawab dan transparan. Transparansi dan akuntabilitas saling berkaitan dan saling mendukung dalam menciptakan lingkungan pemerintahan yang baik. Ketika pemerintah menerapkan praktik akuntansi yang transparan, masyarakat merasa lebih percaya dan memiliki keyakinan bahwa dana publik dikelola dengan baik.

Sebaliknya, akuntabilitas yang kuat akan mendorong pejabat publik untuk beroperasi dengan transparansi, karena mereka tahu

## Contoh Akuntansi Pemerintahan

Contoh akuntansi pemerintahan mencakup berbagai praktik pelaporan dan pengelolaan keuangan yang diterapkan dalam berbagai lembaga pemerintah untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kesinambungan keuangan. Salah satu contoh utama adalah pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

APBD ini mencerminkan rencana anggaran yang disusun secara tahunan, mencakup estimasi pendapatan dari berbagai sumber seperti pajak daerah, retribusi, dan transfer dari pemerintah pusat, serta alokasi anggaran untuk berbagai program publik. Melalui APBD, masyarakat dapat mengetahui perencanaan pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah serta memantau realisasinya sepanjang tahun.



**Gambar 2.1: Ringkasan Pelaporan Anggaran Pemerintah (LKPP 2017)**

Sumber: [djpb.kemenkeu.go.id](http://djpb.kemenkeu.go.id).

Contoh lain adalah laporan realisasi anggaran yang menyajikan perbandingan antara anggaran yang telah disetujui dengan pengeluaran aktual. Laporan ini memungkinkan pemerintah untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan dana publik. Sebagai contoh, pemerintah pusat di Indonesia menerbitkan laporan realisasi anggaran yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan

yang efektif dan akuntabel. Akuntansi pemerintahan berfungsi untuk memastikan bahwa dana publik dikelola dengan transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran, serta mempertimbangkan kesinambungan untuk keberlanjutan pengelolaan jangka panjang.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, pemerintah dapat memberikan laporan keuangan yang jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya. Contoh-contoh pelaporan, seperti Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan pelaporan daerah, menunjukkan bagaimana akuntansi pemerintahan diwujudkan dalam praktik.

Laporan-laporan ini memberikan gambaran tentang bagaimana anggaran dikelola dan digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menambah tingkat akuntabilitas dan memastikan bahwa laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Secara keseluruhan, penerapan akuntansi pemerintahan yang baik adalah kunci untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik. Akuntansi pemerintahan tidak hanya berperan dalam pelaporan keuangan, tetapi juga mendukung proses pengambilan keputusan dan pengawasan yang lebih baik, serta membangun kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, akuntansi pemerintahan memiliki kontribusi yang signifikan dalam menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan bertanggung jawab.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Agyemang, G., & Unerman, J. (2016). *Accountability, Governance and the Public Sector: A Global Perspective*. Routledge.
- Bl'ondal, J. R. (2003). Budget Reform in OECD Member Countries: Common Trends. *OECD Journal on Budgeting*.
- Bovens, M. (2007). Analyzing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework. *European Law Journal*.
- Chan, J. L. (2003). Government Accounting: An Assessment of Theory, Purposes and Standards. *In Public Money and Management*.
- Friedman, A. (2017). Transparency and Trust in Government. *Journal of Public Administration Research and Theory*.
- Hood, C., & Heald, D. (2006). *Transparency: The Key to Better Governance?* Oxford University Press.
- Horngren C. T., S. G. L., & Stratton, W. O. (2018). *Introduction to Management Accounting*. Pearson.
- International Federation of Accountants. (2017). *The Role of Professional Accountants in Public Sector Financial Management*.
- International Public Sector Accounting Standards Board. (2015). *Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements*.
- Kettunen, P., & Kallio, K. (2018). *Public Sector Accounting and Accountability in Australia: A New Perspective*. Cambridge University Press.
- Organization for Economic Co-operation, & Development. (2015). *Principles of Public Governance*.
- Ruppel, W. (2014). *Governmental Accounting Made Easy*. Wiley.

## PROFIL PENULIS



### **Warka Syachbrani, S.E., M.Sc., Ak., CA.**

Sejak sekolah menengah atas, penulis telah menekuni Bidang Akuntansi sebagai pilihan keilmuan untuk didalami. Penulis bergabung dan kelompok belajar Akuntansi dan aktif mengikuti kompetisi-kompetisi keakuntansian antar pelajar. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan pada tingkat Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 Program Studi

Akuntansi di Universitas Hasanuddin pada tahun 2011.

Tahun 2014, penulis menyelesaikan studi S2 di Program Studi Akuntansi pada Program Magister dan Doktor, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada. Penulis memiliki kepakaran dibidang Akuntansi, terkhusus Auditing dan Pengendalian Internal Keuangan Pemerintah. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kementerian. Selain aktif sebagai pengajar dan peneliti Bidang Akuntansi, Penulis juga terlibat dalam aktivitas praktik audit laporan keuangan instansi privat maupun publik. Sehingga, menguatkan keilmuan penulis dari segi pemahaman atas implementasi hasil riset dan pengembangan teori.

Email Penulis: [warka.syachbrani@unm.ac.id](mailto:warka.syachbrani@unm.ac.id).



# **BAB 3**

## **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP)**

---

**Masdar Ryketeng, S.Pd., M.Acc.**  
Universitas Negeri Makassar



## Pendahuluan

Dalam rangka menjamin transparansi, akuntabilitas, serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pada sektor pemerintahan, diterbitkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. PP Nomor 71 Tahun 2010 merupakan pengganti dan pengembangan dari PP Nomor 24 yang ditetapkan pada tahun 2005.

Sebagaimana tertuang pada PP Nomor 71 Tahun 2010, dijelaskan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan merujuk pada rangkaian prinsip atau standar akuntansi yang menjadi landasan atau pedoman dalam proses pengungkapan hingga pelaporan keuangan sektor pemerintahan. Definisi ini sejalan dengan pernyataan Ritoa & Suhartono (2012) yang menyatakan bahwa SAP merupakan segenap standar atau prinsip yang diimplementasikan dalam pengungkapan dan penyajian laporan keuangan pemerintahan.

Jika pada aturan sebelumnya dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 masih menerapkan penggunaan basis kas (*cash basis*) dan basis kas menuju akrual (*cash toward accrual basis.*), maka PP Nomor 71 Tahun 2010 telah menandai diwajibkannya penggunaan basis akrual (*accrual basis*) sebagai pedoman dalam proses pelaporan keuangan sektor pemerintahan. Penerapan basis akrual dalam pelaporan keuangan pemerintah tidak hanya diimplementasikan pada tingkat pemerintah pusat, tetapi juga diimplementasikan dalam pelaporan keuangan oleh pemerintah pada tingkat daerah. Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tersebut, sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (8), meski telah diputuskan secara jelas bahwa pelaporan keuangan pemerintahan harus berbasis akrual, penggunaan basis kas masih dimungkinkan untuk diterapkan khususnya untuk pelaporan yang menyangkut penggunaan atau pelaksanaan anggaran.

Penggunaan akuntansi berbasis kas hanya diterapkan dengan ketentuan apabila penyusunan anggaran tersebut dilakukan dengan basis kas, maka laporan yang menyangkut pelaksanaan anggaran juga harus disusun berdasarkan basis kas, misalnya pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

- anggaran secara efektif dan efisien serta pemanfaatan sumber daya yang diberdaya gunakan secara maksimal;
- e. Sebagai rujukan yang memadai untuk melakukan evaluasi dan penilaian terkait kemampuan atau pencapaian kinerja keuangan pemerintah.

### **Pokok-pokok Penting Penerapan SAP Berbasis Akrua**

Suatu laporan keuangan dianggap memadai apabila penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut dilandaskan pada prinsip-prinsip berlaku umum yang telah ditetapkan dan disetujui secara bersama serta telah dijadikan sebagai aturan baku.

Dalam konteks pemerintahan, pelaporan keuangan yang baik didasarkan pada sejauh mana implementasi dari SAP mampu diterapkan. Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010, penerapan SAP harus dilandaskan pada basis akrual. Selanjutnya PSAP Nomor 01 disebutkan mengenai hal-hal yang menjadi poin atau pokok penting penerapan SAP berbasis akrual dalam pelaporan keuangan sektor pemerintahan.

Beberapa poin penting yang berkaitan dengan SAP dengan *accrual basis* tersebut adalah sebagai berikut:

#### **1. Entitas Akuntansi dan Pelaporan**

Sebagaimana diatur dalam paragraf 21 PP Nomor 71 Tahun 2010, tertuang bahwa yang dimaksud dengan entitas akuntansi dalam konteks SAP adalah unit pada sektor pemerintahan yang memiliki keharusan untuk melakukan pengelolaan atas anggaran serta penyelenggaraan pelaporan keuangan pemerintahan yang berlandaskan SOTK masing-masing pemerintah daerah. Pihak-pihak yang dimaksud meliputi:

- a. Sekretariat daerah (Sekda)
- b. Sekretariat Dewan
- c. Dinas
- d. Badan
- e. Kantor
- f. Kecamatan
- g. Kelurahan

- g. Pembiayaan.
- h. Saldo Anggaran Lebih (SAL).
- i. Pendapatan-LO.
- j. Beban.
- k. Arus Kas.

## 6. Unsur-Unsur Laporan Keuangan Berdasarkan SAP Berbasis Akrual

Sebagaimana tertuang dalam paragraf 60 Kerangka Konseptual, dijelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) komponen penting dalam laporan keuangan pemerintahan yang harus disajikan. Ketiga laporan tersebut meliputi laporan mengenai pelaksanaan atau penggunaan anggaran, laporan keuangan, dan CALK.

Laporan mengenai pelaksanaan anggaran adalah laporan yang berisi informasi tentang realisasi anggaran pada tahun tersebut. Laporan mengenai pelaksanaan anggaran meliputi 2 (dua) laporan utama yakni Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan mengenai Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL).

Sementara itu, laporan keuangan merupakan laporan yang menyajikan posisi keuangan yang meliputi laporan operasional, neraca, arus kas, dan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan. Secara rinci, unsur-unsur laporan keuangan pemerintahan yang harus disajikan adalah:

<b>UNSUR LAPORAN KEUANGAN</b>	
KATEGORI	LAPORAN
Laporan mengenai Pelaksanaan/Penggunaan Anggaran	1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
Laporan Finansial/Laporan Keuangan	1. Laporan Operasional (LO) 2. Laporan Posisi keuangan (Neraca) 3. Laporan Arus Kas (LAK) 4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Catatan atas Laporan keuangan (CALK)	

**Gambar 3.1: Unsur Laporan Keuangan Pemerintahan Berbasis Akrual**

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (2010).

## Daftar Pustaka

- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2021). *Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual*.
- Kumortomo, W. (2019). *Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual: Dasar & Argumentasi Kebijakan*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2015). *Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat*. Jakarta: Kemenkumham.
- Republik Indonesia. (2005). *Lampiran II Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Lembaran Negara RI Tahun 2005.
- Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123.
- Ritonga, I. T., & Suhartono, E. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah Sesuai PP 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Lembaga Kajian Manajemen Pemerintah Daerah.

## PROFIL PENULIS




### **Masdar Ryketeng, S.Pd., M.Acc.**

Lahir di Larantuka, 12 Desember 1991, dari ayah bernama Marsus Djafar dan ibu bernama Rosmiati Jafar (Almh.). Penulis memiliki istri bernama Herdiana dan dikaruniai dua orang anak. Penulis bertempat tinggal di BTN Bumi Somba Opu Blok C9 Nomor 7 Jalan Macanda Kelurahan Mawang Kecamatan Bumi Somba Opu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.

Ketertarikan penulis terhadap Akuntansi dan Audit dimulai pada tahun 2007 silam. Aktif pada komunitas akuntansi sejak SMA dan berhasil mengikuti lomba-lomba di bidang akuntansi. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Makassar pada tahun 2013 dan tahun 2016 penulis menyelesaikan studi S2 di prodi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.

Selanjutnya, Tahun 2023 diwisuda pada Program Pendidikan Profesi Akuntansi di Universitas Hasanuddin. Penulis aktif sebagai dosen sejak 2017 dan sejak 2022 menjadi Dosen ASN pada Prodi Akuntansi Universitas Negeri Makassar. Selain itu, penulis juga aktif sebagai pemeriksa pada Kantor Akuntan Publik sehingga berpengalaman lebih dari 9 tahun dalam bidang Audit, Akuntansi dan *Finance* baik sektor swasta maupun sektor publik.

Email Penulis: [masdar.ryketeng@unm.ac.id](mailto:masdar.ryketeng@unm.ac.id).



**BAB 4**  
**SISTEM AKUNTANSI**  
**PEMERINTAH PUSAT**  
**DAN DAERAH**

---

**Rifki Abdul Malik, S.E., Ak., M.Ak.**  
Universitas Galuh



## **Perkembangan Akuntansi Pemerintah di Indonesia**

Sistem akuntansi pemerintahan Indonesia berkembang relatif lambat dalam menanggapi tuntutan zaman. Selain itu, akuntansi pemerintahan Indonesia belum digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kinerja birokrasi pemerintah dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat.

Dalam jangka panjang, akuntansi pemerintahan Indonesia menghasilkan hasil yang seringkali tidak tepat, terlambat, dan kurang informatif, sehingga tidak diperlukan lagi dalam pengambilan keputusan. Kenyataannya, munculnya praktik KKN seringkali dibantu oleh semua kelemahan dalam akuntansi pemerintahan saat itu. Meskipun demikian, telah terjadi dorongan signifikan untuk memperbaiki akuntansi pemerintah Indonesia selama sepuluh tahun terakhir, yang telah menghasilkan terciptanya tiga paket keuangan negara.

Berikut ini adalah beberapa variabel signifikan yang baru-baru ini berkontribusi terhadap pertumbuhan pesat pengembangan akuntansi pemerintah Indonesia:

1. Ditetapkannya tiga paket UU yang mengatur Keuangan Negara Pasal 32 (1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
2. Ditetapkannya UU tentang pemerintahan daerah dan UU tentang pengembangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah. Pasal 184 ayat 1; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
3. Profesi akuntansi. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah lama menginginkan adanya standar akuntansi di sektor publik sebagai hal yang paralel dengan telah adanya lebih dahulu standar akuntansi di sektor komersial.
4. Birokrasi. Pemerintahan merupakan penyusun dan sekaligus pemakai yang berkepentingan akan adanya suatu akuntansi

yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk menyusun neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

SABMN merupakan sub sistem dari SAI. Untuk melaksanakan SABMN, Kementerian Negara/Lembaga membentuk Unit Akuntansi Barang sebagai berikut:

- a. Unit Akuntansi Pengguna Barang yang selanjutnya disebut UAPB adalah unit akuntansi BMN pada tingkat kementerian/lembaga yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAPPB-E1. yang penanggung jawabnya adalah Menteri/Pimpinan Lembaga.
- b. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I, yang selanjutnya disebut UAPPB-E1, adalah unit akuntansi BMN pada tingkat Eselon 1 yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAPPB-W dan UAKPB yang langsung berada di bawahnya yang penanggung jawabnya adalah pejabat Eselon I.
- c. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah, yang UAPPB-W adalah unit akuntansi BMN pada tingkat wilayah yang ditetapkan sebagai UAPPB-W dan melakukan kegiatan penggabungan BMN dari UAKPB. penanggung jawabnya adalah Kepala Kantor Kepala unit kerja. ditetapkan sebagai UAPPB-W.
- d. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang, yang selanjutnya disebut satuan kerja/kuasa pengguna barang yang memiliki wewenang penggunaan BMN.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

Akbar, B. (2013). *Akuntansi Pemerintahan*.

Hidayat, S. (2021). *Buku Ajar Akuntansi Pemerintah PT Inovasi Pratama Internasional*. 1–66.

Liona Efrina s, Armiani, Rafles Ginting, Citra Puspa Permata, V. Ananta Wikrama Tungga Dewi, Tomy Rizky Izzalqurny, Hantono, Windi Ariesti Anggraeni, Rini Sulastri, Ika Swasti Putri, Rifki Abdul Malik, Nitri Mirosea, Rissa Anandita, & Eko Sudarmanto. (2024). *Desain Riset Akuntansi Berbasis Inovasi*. <https://repository.penerbiteureka.com/publications/568669/desain-riset-akuntansi-berbasis-inovasi>.

Malik, R. A., Herlina, N., Gracetinia, A., & Sari, P. (2024). *Sosialisasi Dan Studium Generale Digital Marketing*. 8(3), 5–6.

Malik, R. A., Mulyatini, N., Akbar, D. S., Rizkia, T. S., Ekonomi, F., & Galuh, U. (2023). How Digital Tax Socialization Moderates E-Filing Against Individual Taxpayer Compliance. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(3), 715–730. <https://doi.org/10.24843/EJA.2023.v33.i03.p10>.


## PROFIL PENULIS



### **Rifki Abdul Malik, S.E., Ak., M.Ak.**

Penulis lahir di Ciamis Jawa Barat tanggal 10 Juli 1994. Penulis adalah dosen tetap di Universitas Galuh Fakultas Ekonomi pada Program Studi Akuntansi. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Gunadarma pada jurusan Akuntansi, S1 Program Profesi Akuntansi di Universitas Widyatama, dan S2 di Universitas Widyatama pada Jurusan Magister Akuntansi. Penulis sudah menulis *chapter books* seperti *Desain Riset Akuntansi Berbasis Inovasi* dan buku referensi Akuntansi Pajak: *Strategi Perencanaan dan Pelaporan Pajak Dalam Bisnis*, dan *book chapter* *Pengantar Perpajakan*.

Email Penulis: [rifkiabdulmalik@gmail.com](mailto:rifkiabdulmalik@gmail.com).



**BAB 5**  
**PENYUSUNAN**  
**LAPORAN KEUANGAN**  
**PEMERINTAH PUSAT**  
**DAN DAERAH**

---

**Dahlia Tri Anggraini, S.E., M.M.**  
Universitas Muhammadiyah Jakarta



## Pendahuluan

Pemerintah Indonesia beberapa kali telah mereformasi basis pelaporan keuangannya. Awalnya, berbasis kas, kemudian *cash towards accrual*, dan saat ini menjadi basis akrual untuk pengakuan seluruh elemen laporan keuangan. Hal ini diatur di dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Tim penyusun SAP tersebut adalah Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

Tim independen ini ditetapkan melalui pertimbangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kemudian disahkan dengan Peraturan Pemerintah (PP). Dalam rangka penyusunan laporan keuangan terdapat beberapa tahap yaitu menyusun neraca saldo awal, menjurnal APBN (yang sudah disahkan), pencatatan DIPA, menjurnal transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan, menyusun *trial balance*, mencatat transaksi penyesuaian dan jurnal penutup, terakhir menyusun *financial statement*.

*Financial statement* pemerintah yaitu 1) Laporan Pelaksanaan Anggaran (basis kas) yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), 2) Laporan Finansial (Basis Akrual) terdiri dari *balance-sheet*, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan *cash flow*, dan 3) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yaitu laporan penjelas yang merincikan elemen-elemen laporan keuangan.

## Siklus Akuntansi Pemerintah

Pada pemerintah, siklus akuntansi diawali dari penjurnalan APBN (yang sudah disahkan), saldo awal, transaksi penerimaan serta pengeluaran, dan transaksi lainnya. Setelah itu proses pengklasifikasian dalam buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan menyusun *financial statement*.

Akuntansi pemerintah pusat memiliki siklus tersendiri yang terdiri atas tahap:

### 1. Menyusun Neraca Awal

Pada tahap awal ini dibuatlah neraca yang di dalamnya terdapat informasi tentang aktiva, pasiva, dan ekuitas dana. Terdapat dokumen sumber yaitu laporan keuangan pemerintah pada tahun sebelumnya yang telah diaudit.

## 2. Penjurnalan APBN (yang sudah disetujui)

APBN merupakan *financial planning* pemerintah yang diperuntukkan pada kegiatan satu tahun meliputi akun *revenue*, *expense* serta *financing*. Maka elemen APBN tersebut kita lakukan penjurnalan. Terdapat sub sistem terkait pada langkah ini yaitu sub-Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) dari Sistem Akuntansi Pusat (SAP).

## 3. *Plotting* Dalam DIPA

Sesudah penjurnalan atas APBN yang sudah disetujui, maka Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan memplotkan elemen-elemen yang ada di APBN dengan format DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) kepada pengguna anggaran. DIPA akan dicatat dalam sub Sistem Akuntansi Umum (SAU) oleh SAP dan akan dicatat dalam Sistem Akuntansi Instansi (SAI) oleh instansi/unit pengguna anggaran.

## 4. Penjurnalan Transaksi *Revenue*, *Expense*, dan *Financing*

Setelah langkah *plotting* anggaran ke dalam DIPA, langkah selanjutnya penjurnalan atas transaksi dari kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi *revenue*, *expense*, dan *financing*. Hal ini mengakibatkan realisasi anggaran yaitu masuk dan keluarnya kas atau penambahan/pengurangan ekuitas. Transaksi melibatkan SAKUN jika berkaitan dengan keluar/masuknya Kas Umum Negara, melibatkan SAU jika berkaitan dengan transaksi yang menambah/mengurangi ekuitas, dan SAI jika berkaitan dengan penambahan/pengurangan ekuitas instansi yang bersangkutan.

Terdapat dokumen sumber pada tahap ini yaitu Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Bukti Penerimaan Negara (BPN), juga dokumen lainnya.

## 5. Penyusunan *Trial Balance*

Penyusunan *Trial Balance* dapat dilakukan pada akhir periode akuntansi. *Trial Balance* adalah rangkuman keseluruhan transaksi selama periode akuntansi yaitu akun-akun yang lengkap terkait transaksi yang terjadi. Akun-akun dalam *Trial Balance* merupakan cikal bakal akun yang terdapat laporan keuangan Pemerintah Pusat.

**PEMERINTAH PUSAT**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	EKUITAS AWAL	XXX	XXX
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	XXX	XXX
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	XXX	XXX
5	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	XXX	XXX
6	LAIN-LAIN	XXX	XXX
7	EKUITAS AKHIR	XXX	XXX

**Gambar 5.7: Laporan Perubahan Ekuitas**

Sumber: <https://blud.co.id/wp/penyusunan-laporan-perubahan-ekuitas/>.

**7. CaLK**

Meliputi penjelasan terperinci atas nominal yang tercantum dalam *financial statement* pemerintah, serta memberikan informasi terkait *accounting policies* yang digunakan pemerintah, juga informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan diungkapkan sesuai SAP untuk kewajaran penyajian laporan keuangan.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

Erlina, Rambe OS., Rasisanto. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Jakarta: Salemba Empat.

Fauziah, I. (2018). *SAP: Standar Akuntansi Pemerintahan*. Tangerang Selatan: Penerbit Ilmu.

<https://blud.co.id/wp/penyusunan-laporan-operasional/>.

<https://blud.co.id/wp/penyusunan-laporan-perubahan-ekuitas/>.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>.

Karunia, RL. (2022). *Akuntansi Pemerintahan: Konsep dan Praktik di Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Sujarweni, VW. (2015). *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Penerbit Pusaka Baru Press.

## PROFIL PENULIS



### **Dahlia Tri Anggraini, S.E., M.M.**

Penulis mulai tertarik terhadap ilmu Akuntansi dan Manajemen Keuangan Syariah saat mengenyam bangku Pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 2008 silam. Di mana penulis memfokuskan diri pada skripsi dengan tema Perlakuan Akuntansi Dana Tabarru' pada Asuransi Syariah. Setelah menempuh program S1, penulis menjadi karyawan di Bank Muamalat Indonesia (2010-2017). Tahun 2015, penulis menyelesaikan studi S2 di prodi Manajemen Program Pasca Sarjana Universitas Pamulang. Dan saat ini penulis sedang meneruskan Pendidikan di Program Doktor Ilmu Akuntansi Universitas Ageng Tirtayasa. Penulis memiliki kepakaran di bidang Manajemen Keuangan dan Akuntansi Syariah. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang yang sesuai dengan kepakaran tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi. Selain meneliti, penulis juga berupaya untuk aktif dalam menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: [d.trianggraini@umj.ac.id](mailto:d.trianggraini@umj.ac.id).



# **BAB 6**

## **PENDAPATAN DAN BELANJA DALAM AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

---

**Nurafni Oktaviah, S.E., M.Ak.**  
Universitas Negeri Makassar



## Pendahuluan

Akuntansi pemerintahan merupakan proses atau sistem yang diterapkan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk mencatat, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, dan melaporkan kinerja keuangan pemerintah. Penerapan akuntansi pemerintahan merupakan komitmen pemerintah untuk menunjukkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana masyarakat.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjadi pedoman untuk menjalankan akuntansi pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Standar tersebut bertujuan untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelaporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

PP No. 71 Tahun 2010 mendefinisikan akuntansi pemerintahan sebagai serangkaian proses yang dimulai dari pengumpulan, pencatatan, pengikhtisaran, hingga pelaporan keuangan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan standar tertentu (Indonesia, 2010). Akuntansi pemerintahan sebagai sistem yang mencatat, mengklasifikasi, dan melaporkan transaksi keuangan entitas pemerintah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengawasan (Mardiasmo, 2018). Informasi yang dihasilkan akuntansi pemerintahan juga digunakan untuk memenuhi akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat. Tujuan akuntansi pemerintahan adalah menyediakan informasi yang akurat dan relevan untuk memudahkan pengelolaan anggaran dan mendukung akuntabilitas pemerintah kepada publik (Mahmudi, 2015).

Pendapatan dan belanja menjadi salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam akuntansi pemerintahan. Pengelolaan pendapatan dan belanja yang baik penting untuk menghindari ketidaksesuaian penggunaan dana publik dan memungkinkan pemerintah mencapai tujuan-tujuan strategisnya (Halim & Kusufi, 2014). Pengelolaan pendapatan yang baik memastikan adanya sumber dana yang memadai, sementara pengelolaan belanja yang efisien membantu pemerintah dalam menjaga keberlanjutan program dan pelayanan publik.

Pengelolaan pendapatan dan belanja dalam akuntansi pemerintahan berperan penting dalam mencegah penyalahgunaan anggaran, memastikan transparansi penggunaan dana, dan memungkinkan pemerintah untuk melaporkan kondisi keuangan secara akurat kepada Masyarakat (Bastian, 2010). Pengelolaan pendapatan dan belanja yang baik dalam akuntansi pemerintahan sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan, menjaga kepercayaan publik, dan memastikan efisiensi serta akuntabilitas dalam penggunaan dana publik.

PP No. 71 Tahun 2010 menguraikan pentingnya pengelolaan pendapatan dan belanja dijelaskan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran. Standar ini menekankan perlunya akuntabilitas dalam pencatatan dan pelaporan pendapatan dan belanja sehingga laporan keuangan dapat menjadi alat evaluasi dan perencanaan, serta memastikan bahwa pemerintah memenuhi tanggung jawabnya kepada publik.

## **Pendapatan Dalam Akuntansi Pemerintahan**

### **1. Pengertian dan Jenis Pendapatan**

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mendefinisikan pendapatan pemerintah sebagai semua penerimaan yang diterima oleh pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas, tidak akan dibayar kembali, dan tidak menyebabkan kewajiban kepada pihak lain.

Pendapatan ini terdiri dari berbagai sumber yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah, termasuk belanja operasional dan pembangunan. PP No. 71 Tahun 2010 menguraikan pendapatan pemerintah yang dibagi ke dalam beberapa jenis utama, antara lain:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang diolah berdasarkan aturan yang berlaku. Sumber PAD meliputi:

- 1) Bantuan langsung tunai yaitu pengeluaran untuk memberikan bantuan uang tunai langsung kepada masyarakat miskin.
  - 2) Bantuan pangan yaitu pengeluaran untuk menyediakan bahan pangan bagi masyarakat yang membutuhkan.
  - 3) Bantuan Kesehatan yaitu pengeluaran untuk memberikan bantuan kesehatan atau pembiayaan untuk pengobatan masyarakat kurang mampu.
- f. Belanja tak terduga (*Contingency Expenditure*). Belanja tak terduga adalah pengeluaran yang digunakan untuk menanggulangi keadaan darurat atau situasi yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, seperti bencana alam, pandemi, atau keadaan darurat lainnya yang memerlukan dana cepat. Contoh belanja tak terduga seperti:
- 1) Bantuan untuk bencana alam yaitu pengeluaran untuk memberikan bantuan dan pemulihan akibat bencana alam.
  - 2) Biaya darurat yaitu pengeluaran yang timbul akibat situasi darurat yang tidak diperkirakan dalam anggaran.
- g. Belanja pegawai (*Employee Expenditure*). Belanja pegawai adalah pengeluaran yang terkait dengan kompensasi atau penghasilan pegawai pemerintah, termasuk gaji, tunjangan, dan imbalan lainnya. Belanja ini merupakan bagian penting dari belanja operasional. Contoh belanja pegawai seperti:
- 1) Gaji dan upah pegawai yaitu pengeluaran untuk membayar gaji dan upah pegawai negeri sipil (PNS) dan tenaga honorer.
  - 2) Tunjangan pegawai yaitu pengeluaran untuk tunjangan yang diterima oleh pegawai pemerintah, seperti tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, dan tunjangan lainnya.

#### 4. Pengukuran dan Pelaporan Belanja

Pengukuran belanja dalam PP 71 Tahun 2010 didasarkan pada prinsip akuntansi berbasis akrual, yang berarti pengeluaran diakui pada saat kewajiban untuk membayar timbul, bukan pada saat kas dibayar. Dengan demikian, pengukuran belanja memperhatikan nilai kewajiban yang harus dibayar oleh pemerintah, meskipun pembayaran kas mungkin baru dilakukan di periode yang berbeda.

Pelaporan belanja bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penggunaan anggaran pemerintah. Laporan ini harus sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang memungkinkan pihak terkait, seperti masyarakat, DPR, dan lembaga pengawas, untuk menilai sejauh mana belanja telah digunakan sesuai dengan tujuan dan peruntukannya.

Jenis laporan keuangan yang melibatkan pelaporan belanja adalah LRA yang merupakan laporan yang menunjukkan realisasi pendapatan dan belanja pemerintah dalam periode tertentu (biasanya tahunan). Pada LRA, belanja dilaporkan berdasarkan kategori fungsi, program, dan jenis belanja. Selain itu, laporan arus kas (*cash flow statement*) juga terdapat pelaporan belanja. Laporan arus kas memberikan gambaran mengenai aliran kas pemerintah, termasuk kas yang digunakan untuk membiayai belanja.

Meskipun pengakuan belanja dilakukan berdasarkan akrual, laporan arus kas menunjukkan bagaimana belanja tersebut mempengaruhi posisi kas pemerintah. Catatan atas laporan keuangan (*notes to the financial statements*) memberikan informasi tambahan tentang belanja yang tidak tercermin sepenuhnya dalam laporan utama. Misalnya, catatan mengenai komitmen belanja yang akan dilakukan di masa depan, kontrak yang sedang berjalan, atau perjanjian yang belum sepenuhnya terealisasi.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

Bastian, I. (2010) *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, A., & Kusufi, M.S. (2014) *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Mahmudi (2015) *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: UPP STIM YKPN.

Mardiasmo (2018) *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Indonesia.

## PROFIL PENULIS



### **Nurafni Oktaviah, S.E., M.Ak.**

Penulis adalah dosen Jurusan Ilmu Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Gelar sarjana ekonomi diperoleh tahun 2013 di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin. Jenjang pendidikan magister dicapai pada tahun 2017 setelah dua tahun menempuh pendidikan di Program Pascasarjana Magister Akuntansi Universitas Muslim Indonesia. Ketertarikan pada bidang Akuntansi bermula ketika penulis menyadari bahwa bidang akuntansi memiliki manfaat yang signifikan jika diterapkan dengan baik, termasuk memiliki peluang besar di berbagai bidang. Penulis memiliki kepakaran di bidang akuntansi manajemen. Selain aktif pada kegiatan penelitian dan pengabdian, penulis juga adalah asesor BAN PDM, Tutor *Online* UT, dan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.

Email Penulis: [nurafni.oktaviah@unm.ac.id](mailto:nurafni.oktaviah@unm.ac.id).




# **BAB 7**

# **PENGELOLAAN APBN**

# **DAN APBD**

---

**Dede Riswandi, S.E., M.Ak.**  
Universitas Cipasung Tasikmalaya



## **Pendahuluan**

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan aspek penting dalam tata kelola keuangan publik di Indonesia. Bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang pengelolaan kedua anggaran tersebut, termasuk proses penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan tantangan yang dihadapi. Pemahaman ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwa anggaran publik digunakan secara efisien dan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.

## **Pengertian APBN dan APBD**

APBN adalah rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah pusat dan disetujui oleh DPR. APBN mencakup semua pendapatan dan belanja yang dilakukan oleh pemerintah selama satu tahun anggaran.

Tujuan utama dari APBN adalah untuk memfasilitasi pencapaian kebijakan pembangunan nasional dan penetapan prioritas dalam penggunaan sumber daya (Haryanto, 2017). APBD adalah rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah dan juga harus disetujui oleh DPRD. APBD mencakup pendapatan dan belanja daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan lokal dan pelayanan publik di tingkat daerah (Heri, 2019).

Pengelolaan APBN dan APBD yang efektif dan efisien menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan. Pada tingkat nasional, APBN berfungsi untuk membiayai proyek-proyek strategis seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, serta perbaikan sistem kesehatan. Di sisi lain, APBD lebih berfokus pada kebutuhan lokal, seperti pengembangan sarana transportasi daerah, program kesehatan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan di tingkat desa atau kota (Hesna et al., 2018).

APBN dan APBD juga menjadi alat redistribusi pendapatan melalui berbagai program subsidi dan bantuan sosial, yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah. Dengan demikian, keduanya tidak hanya sekadar dokumen keuangan, tetapi juga merupakan alat manajemen pembangunan yang harus dikelola secara akuntabel dan transparan (Tobing, 2011).

LKPD, kepala daerah juga menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang disampaikan kepada DPRD.

LKPJ berisi evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta kendala yang dihadapi selama tahun anggaran (Pratama & Santoso, 2022).

## 5. Sanksi dan Tindak Lanjut

Jika ditemukan pelanggaran dalam pengelolaan APBD, baik dalam bentuk penyimpangan anggaran, korupsi, atau ketidakpatuhan terhadap regulasi, pemerintah daerah dapat dikenakan sanksi administratif atau hukum. Sanksi administratif meliputi pengembalian kerugian negara, pemberhentian pejabat terkait, atau pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.

Untuk pelanggaran yang lebih berat, seperti kasus korupsi, akan ditangani oleh aparat penegak hukum seperti Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Proses hukum ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip *good governance*.

## Tantangan dan Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan APBN dan APBD

### 1. Tantangan Dalam Pengelolaan APBN dan APBD

- a. Ketergantungan pada Penerimaan Pajak.
- b. Disparitas antara Pusat dan Daerah.
- c. Pembiayaan Utang dan Defisit Anggaran.
- d. Pengelolaan Belanja yang Efisien dan Berkelanjutan.
- e. Ketidakpatuhan dan Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan.
- f. Tantangan dalam Teknologi dan Inovasi Pengelolaan Keuangan.

### 2. Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah

- a. Keterlibatan Masyarakat dalam Pengawasan.
- b. Keterbukaan Informasi Anggaran.
- c. Penguatan Sistem Laporan dan Evaluasi.

- d. Kolaborasi antara Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
- e. Mendorong Kesadaran Sosial dan Budaya Transparansi.

## **Kesimpulan**

Peran masyarakat dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Melalui keterlibatan aktif dalam pengawasan, partisipasi dalam proses pembuatan keputusan, serta pendidikan tentang anggaran, masyarakat dapat berperan sebagai kontrol sosial yang sangat dibutuhkan dalam sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Pemerintah harus memfasilitasi dan mendukung partisipasi masyarakat dengan menyediakan informasi yang jelas, membuka akses terhadap laporan anggaran, dan menciptakan *platform* yang memungkinkan pengaduan dan masukan dari publik.

Dengan demikian, pengelolaan keuangan negara dan daerah dapat dilakukan dengan lebih efisien, transparan, dan bermanfaat bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Aldira LZ, E. (2021). Aspek Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(02). <https://doi.org/10.46799/jst.v2i2.230>.
- Amrizal, A., Bahrin, B., & Yusrizal, Y. (2021). Management of Educational Financing in Higher Education. *Journal of Education Research and Evaluation*, 5(4). <https://doi.org/10.23887/jere.v5i4.35434>.
- Haryanto, E. (2017). *Evaluasi Kebijakan Penerbitan Sukuk Negara Sebagai Instrumen Pembiayaan APBN (I)*. Gava Media.
- Heri, A. (2019). Apbn dan Apbd. *Kemendikbud, 1900312310036*.
- Hesna, Y., Suraji, A., Rahmadani, S., & Ikhwanul Satria, E. (2018). Studi Kesiapan Daerah Untuk Investasi Infrastruktur Sosial Berbasis Pembiayaan Non APBN/APBD. *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas*, 2(0). <https://doi.org/10.12962/j26151847.v2i0.4912>.
- Ibnu. (2020). Pengertian APBN dan APBD, Serta Fungsi dan Tujuannya. *Accurate*.
- Jamaluddin Dwi Risma. (2021). Akuntansi Sektor Publik. *Akuntansi Sektor Publik, August*.
- Makmur. (2017). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Refika Aditama.
- Mutiarin, D., & Zaenudin, A. (2017). *Manajemen Birokrasi Dan Kebijakan Penelusuran Konsep Dan Teori*. Pustaka Pelajar.
- Nevi Costari, & Putri Ariella Belinda. (2021). Pentingnya Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Suatu Instansi Pemerintahan. *JAMANTA: Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, 1(1). [https://doi.org/10.36563/jamanta\\_unita.v1i1.421](https://doi.org/10.36563/jamanta_unita.v1i1.421).
- Nofiana Erwanti, N., Wahyunadi, W., & Mahmudi, H. (2023). The Influence of Regional Expenditure In The Education, Health, And Investment Sectors On The Human Development Index In Eastern Indonesia Region. *Return: Study of Management, Economic and Business*, 2(6). <https://doi.org/10.57096/return.v2i06.110>.
- Nugroho, R. Dwijodijoto. (2013). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. PT Elex Media Komputindo.

- Pratama, F. K., & Santoso, B. (2022). Kajian Yuridis Kerjasama Pemerintah Dan Swasta Model BOT (Build Operate Transfer) Sektor Infrastruktur Jalan Di Indonesia. *Notarius*, 15(2). <https://doi.org/10.14710/nts.v15i2.36033>.
- Tobing, P. L. (2011). *Konsep Knowledge Management, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Graha Ilmu.
- Wibawa, S. (2008). *Kebijakan Publik: Proses dan Analisis* (II). Intermedia.
- Yogiantoro, M., Komariah, D., & Irawan, I. (2019). Effects Of Education Funding In Increasing Human Development Index. *JEJAK*, 12(2). <https://doi.org/10.15294/jejak.v12i2.23391>.

## PROFIL PENULIS



### **Dede Riswandi, S.E., M.Ak.**

adalah dosen di Program Studi Akuntansi Universitas Cipasung Tasikmalaya (UNCIP Tasikmalaya) yang memiliki pengalaman mengajar di bidang akuntansi. Dengan latar belakang Pendidikan penulis masuk ke Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Singaparna dengan memilih Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan berhasil lulus pada tahun 2015. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cipasung (STIE Cipasung) tahun 2019. Satu tahun kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 di prodi Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Widyatama Bandung pada tahun 2022. Selain mengajar, penulis juga aktif menulis artikel dan penelitian yang berkaitan dengan akuntansi, dengan tujuan untuk berbagi pengetahuan dan pemahaman lebih dalam tentang topik-topik tersebut. Dalam setiap karya yang dihasilkan, penulis berusaha untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pembaca, terutama dalam konteks pendidikan dan praktik akuntansi. Dengan pengalamannya di dunia akademik, penulis terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan penelitian, serta berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi.

Email Penulis: [dederiswandi@uncip.ac.id](mailto:dederiswandi@uncip.ac.id).



# **BAB 8**


# **LAPORAN KEUANGAN**

# **BADAN LAYANAN**

# **UMUM (BLU)**

---

**Siti Hartinah, S.E., M.Ak.**  
Universitas Muhammadiyah Jakarta



Jika dilihat dari karakteristik perusahaan swasta yang dibentuk dengan dasar motivasi untuk memperoleh keuntungan. Dana nya diperoleh dari pelanggan dan perusahaan tunduk dalam mekanisme pasar. Kondisi yang seperti ini menyebabkan adanya kondisi harga yang bersaing dan memberikan kualitas tinggi kepada pelanggannya. Sementara, badan publik memiliki kondisi berbeda dengan didasari adanya mandat dari aturan perundang-undangan, dana yang diperoleh dari pemerintah atau APBN, tunduk dari birokrasi pemerintah yang mengatur secara general bagi organisasi pemerintah.

Hal ini mengakibatkan harga layanan rendah dan dan kualitas rendah. Karena adanya perbedaan karakteristik tersebut yang mengakibatkan munculnya badan layanan publik. Dengan kondisi demikian, pemerintah berpikir untuk membuat badan yang memberikan kualitas layanan tinggi tetapi harganya tidak terlalu tinggi, dengan adanya sharing harga antara harga yang ditanggung oleh pelanggan dan dana yang diperoleh dari APBN.

Selain itu, layanan publik tersebut tetap dalam kontrol pemerintah karena terdapat berbagai layanan yang hanya dilakukan oleh pemerintah tapi tidak bisa diswastakan. Dan supaya layanan publik tetap dikelola secara profesional seperti pengelolaan dalam bentuk model korporasi.

Oleh karena itu, dibentuklah badan layanan umum yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang baik, diberikan fleksibilitas dan otonomi yang lebih dari layanan pemerintah lainnya sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, produktif dan tetap harus menjalankan praktik bisnis yang sehat.

## **Definisi dan Karakteristik Badan Layanan Umum (BLU)**

### **1. Definisi Badan Layanan Umum**

Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas (Republik Indonesia, 2010).

	<b>Belanja Modal</b>				
	- Belanja Tanah	Xxx	Xxx	Xx	Xxx
	- Belanja Peralatan dan Mesin	Xxx	Xxx	Xx	Xxx
	- Belanja Gedung dan Bangunan	Xxx	Xxx	Xx	Xxx
	- Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Xxx	Xxx	Xx	Xxx
	- Belanja Aset Tetap Lainnya	Xxx	Xxx	Xx	Xxx
	- Belanja Aset lainnya	xxx	xxx	Xx	xxx
	<b>Jumlah Belanja Modal</b>	xxx	xxx	xx	Xxx
	<b>Jumlah Belanja</b>	xxx	xxx	xx	Xxx
	<b>Surplus/Defisit</b>	xxx	xxx	xx	Xxx
	<b><u>Pembiayaan :</u></b>				
	<b>Penerimaan</b>				
	<b>Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri</b>				
	Penerimaan Pinjaman	xxx	Xxx	Xx	Xxx
	Penerimaan dari Divestasi	xxx	Xxx	Xx	Xxx
	Penerimaan Kembali Pinjaman pihak lain	xxx	xxx	Xx	xxx
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan dalam Negeri</b>	xxx	xxx	xx	Xxx
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	xxx	xxx	xx	Xxx
	<b>Pengeluaran</b>				
	<b>Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri</b>				
	Pembayaran Pokok Pinjaman	Xxx	Xxx	Xx	Xxx
	Pengeluaran Penyertaan Modal	Xxx	Xxx	Xx	Xxx
	Pemberian Pinjaman Kepada pihak lain	xxx	xxx	xx	Xxx
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri</b>	xxx	xxx	xx	Xxx
	<b>Pembiayaan Neto</b>	xxx	xxx	xx	Xxx

Sumber: Diolah Penulis.

a. Pengakuan Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar dimuka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah daerah antara lain bersumber dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, transfer, dan penerimaan pendapatan daerah lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi.

Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum Daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah daerah setelah periode akuntansi berjalan.

b. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

c. Pengakuan Pendapatan LO dan Pendapatan LRA

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Pendapatan-LO

diakui bersamaan dengan penerimaan kas dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah.

Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

d. Pengakuan Beban dan Belanja

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Pengakuan beban pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja dan Pertanggungjawaban (SPJ), kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

<https://blud.co.id/wp/kebijakan-akuntansi-pada-badan-layanan-umum/>.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Pusat Pelaporan Dan Pembinaan Keuangan Pertahanan. (2020). Juklak22-Pedoman-Penyusunan-Lk-Blu, p. 38.

Komite Standar Akuntansi Pemerintah. (2015). Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, *Standar Akuntansi Pemerintahan No. 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU*, pp. 1-42.

Republik Indonesia. (2010). *Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 13 Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum*. [Preprint].


## PROFIL PENULIS



### **Siti Hartinah, S.E., M.Ak.**

Ketertarikan penulis terhadap ilmu Akuntansi dimulai pada tahun 2006 silam. Hal ini yang mendorong penulis dalam memilih untuk masuk ke Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi lulus pada tahun 2010. Meskipun tidak sejalan dengan Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam yang penulis tempuh di SMA Negeri 1 Serang. Penulis kemudian bekerja di Bank Swasta selama 1 tahun dan berhenti karena ditawarkan menjadi Asisten Dosen Tahun 2011 di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Selain itu, penulis juga diperbantukan menjadi staf Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian, melanjutkan Pendidikan program S2 Universitas Muhammadiyah Jakarta dan berhasil menyelesaikan studi S2 di prodi Magister Akuntansi pada tahun 2018. Pada tahun 2018, Penulis diangkat sebagai Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Jakarta dan bertugas di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Penulis memiliki kepakaran dibidang Akuntansi Keuangan, Perpajakan dan Pemeriksaan Akuntansi. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi kecerdasan bangsa dan negara serta bermanfaat bagi Masyarakat luas.

Email Penulis: [siti.hartinah@umj.ac.id](mailto:siti.hartinah@umj.ac.id).



# **BAB 9**

# **LAPORAN ARUS KAS**

# **DAN LAPORAN**

# **OPERASIONAL (LO)**

---

**Iyak Solihat, S.E., M.Ak.**  
STIE Miftahul Huda Subang



### 1. **Aktivitas Operasi**

Merupakan operasi utama yang menghasilkan pendapatan entitas, beserta aktivitas tambahan yang tidak terkait dengan investasi dan pembiayaan

### 2. **Aktivitas Investasi**

Merupakan tindakan yang berbentuk pembelian dan penjualan aset jangka panjang dan investasi non-tunai lainnya.

### 3. **Aktivitas Terkait Pembiayaan**

Merupakan tindakan yang mengubah kuantitas dan komposisi pinjaman dan kontribusi modal entitas.

## **Arus Kas Untuk Operasional (OCF)**

Arus Kas Operasional (OCF), juga dikenal sebagai kas operasional, merupakan sumber pendapatan utama bagi suatu bisnis dan biasanya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi laba atau rugi bersih suatu entitas.

Aktivitas pendapatan utama dan operasi lain yang bukan aktivitas investasi dan keuangan disebut sebagai aktivitas operasional (Prastowo 2014). Arus kas ini dihitung menggunakan rumus di bawah ini. Houston dan Briingham (2015):

$$\text{Arus Kas Operasi} = \text{NOPAT} + \text{Penyusutan dan Amortisasi}$$

Keterangan:

NOPAT: Net Operation After Tax.

Saat menampilkan arus kas operasi, jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi berfungsi sebagai ukuran apakah bisnis dapat menghasilkan cukup uang sendiri untuk membayar dividen, mempertahankan kemampuan operasional, membayar kembali pinjaman, dan melakukan investasi baru tanpa memerlukan pendanaan luar (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2015).

Ada dua cara untuk menampilkan arus kas dari operasi , khususnya (Martani, 2012).

### 1. **Pendekatan Langsung**

Teknik yang menampilkan kategori utama pembayaran dan penerimaan kas bruto.

## 2. Pendekatan Tidak Langsung

Teknik yang dimulai dengan laba atau rugi untuk periode berjalan dan memodifikasinya menggunakan akrual, transaksi non-tunai, dan item yang ditangguhkan yang mewakili pendapatan atau biaya dalam aktivitas pendanaan dan investasi.

Entitas menggunakan pendekatan langsung untuk mencatat arus kas dari operasi operasi. Karena pendekatan ini menghasilkan data yang berharga untuk memproyeksikan arus kas masa depan yang tidak dapat dihasilkan oleh pendekatan tidak langsung.

## Kas dan Setara Kas

Pernyataan Standar Akuntansi 2013 menyatakan bahwa kas terdiri dari rekening giro dan saldo kas. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang dapat dengan cepat diubah menjadi kas hingga jumlah yang telah ditentukan sebelumnya tanpa menghadapi risiko mengalami fluktuasi nilai yang tajam. (Sugiri & Sumiyatna, 2005) kreditor memantau informasi mengenai kapasitas perusahaan untuk melunasi utang langungnya secara ketat.

Kreditor dapat menggunakan informasi ini bersama dengan data relevan lainnya untuk menentukan apakah akan menyetujui atau menolak permintaan kredit. Ketika memutuskan apakah akan mempertahankan investasi mereka, menambahkannya, atau bahkan menariknya dari bisnis, investor juga mempertimbangkan fakta terkait kas.

Kas dalam bisnis dapat dipisahkan menjadi banyak kategori berdasarkan klasifikasinya. Menurut (Effendi, 2013), kas didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan komitmen, baik dalam bentuk uang maupun tidak. Beberapa jenis kas perusahaan meliputi berikut ini:

### 1. *Petty Cash* (Kas Kecil)

*Petty Cash* adalah kas dalam bentuk uang tunai yang disiapkan oleh perusahaan untuk membayar berbagai pengeluaran yang nilainya relatif kecil dan tidak ekonomis bila melakukan pembayaran dengan mempergunakan cek. Pada pencatatan arus kas kecil perusahaan biasanya menggunakan dua metode yaitu metode sistem dana tetap dan metode sistem dana berubah-ubah.

Beban :		
Beban operasi	(XXX)	(XXX)
Beban transfer	(XXX)	(XXX)
Beban lain	(XXX)	(XXX)
Jumlah beban	( XXXX)	(XXXX)
Jumlah surplus /defisit operasi	XXXX/ (XXXX)	XXXX/(XXXX)
Non Operasional	XXX	XXX
Pos luar biasa	XXX	XXX
Jumlah surplus /defisit - LO	XXXX/(XXXX)	XXXX/(XXXX)

Sumber: Diolah Penulis.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Effendi, R. (2013). *Accounting Principles Prinsip-Prinsip Akuntansi Berbasis SAK ETAP* (Revisi). PT. Rajagrafindo Persada.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2015). *Pernyataan Standar Akuntansi*.
- Kieso, Donald E, Weygant, Jerry J. & Warfield, & Terry D. (2011). *Akuntansi keuangan Menengah* (IFRS). Salemba Empat.
- Martani, D. et all. (2012). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Salemba Empat.
- Sugiri, & Sumiyatna. (2005). *Akuntansi Keuangan Menengah* (Buku Satu).
- Warrent, dkk. (2014). *Accounting Indonesia Adaptation*. Salemba Empat.


## PROFIL PENULIS



### **Iyak Solihat, S.E., M.Ak.**

Pada awalnya penulis merasa tertarik dengan ilmu akuntansi pada tahun 1998 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih masuk kuliah jurusan Akuntansi. Penulis meraih gelar sarjana bidang akuntansi dari Universitas Bandung (UNISBA) pada tahun 2003. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada tahun 2012 jurusan Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIEI) di Jakarta. Penulis berhasil lulus pada tahun 2014 dengan meraih gelar Magister Akuntansi. Penulis memiliki kepakaran di bidang Akuntansi. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen yang profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan di danai oleh STIE Miftahul Huda Subang. Penulis juga aktif menulis jurnal dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang tercinta ini.

Email Penulis: [iyaksolihat2@gmail.com](mailto:iyaksolihat2@gmail.com).



# **BAB 10**

# **CATATAN ATAS**

# **LAPORAN KEUANGAN**

# **(CALK)**

---

**Ade Elza Surachman, S.E., Ak., M.Ak.**  
Universitas Catur Insan Cendekia



## **Pendahuluan**

Dalam akuntansi pemerintahan, Catatan atas Laporan Keuangan memiliki peran penting untuk menyediakan informasi tambahan yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh angka-angka dalam laporan utama. Bab ini bertujuan menetapkan pedoman dan ketentuan agar Catatan atas Laporan Keuangan dapat meningkatkan transparansi dan membantu pengguna memahami laporan keuangan pemerintah secara lebih menyeluruh. Informasi yang disajikan mencakup dasar penyusunan laporan, metode akuntansi yang dipilih, dan konteks di balik data numerik. Dengan transparansi ini, publik, auditor, dan pihak pengawas dapat lebih mudah mengevaluasi bagaimana pemerintah mengelola dan membelanjakan dana publik.

## **Definisi Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)**

Bab ini menjelaskan mengenai istilah-istilah penting yang menjadi landasan dalam penyusunan dan pemahaman Catatan atas Laporan Keuangan berdasarkan (Presiden Republik Indonesia, 2010) & (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2022):

### **1. Anggaran**

Anggaran merupakan panduan yang memuat rencana penerimaan, pengeluaran, transfer, dan pembiayaan dalam bentuk satuan uang dan disusun sistematis untuk periode tertentu sesuai klasifikasi yang ditentukan.

### **2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)**

APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang telah disetujui DPR, memuat sumber penerimaan dan alokasi belanja negara untuk satu tahun.

### **3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disahkan oleh DPRD, digunakan untuk mengatur anggaran daerah demi pelaksanaan program pemerintah di tingkat daerah selama satu tahun.

### **4. Basis Akrual**

Basis akrual adalah metode yang mengakui transaksi saat terjadi peristiwa, tanpa bergantung pada waktu pembayaran atau

penerimaan kas, sehingga memberi gambaran yang lebih utuh tentang posisi keuangan.

**5. Basis Kas**

Basis kas mencatat transaksi hanya saat penerimaan atau pembayaran kas terjadi, sehingga lebih menggambarkan aliran kas yang aktual dalam periode tersebut.

**6. Aset**

Aset adalah sumber daya yang dikuasai pemerintah, diharapkan memberi manfaat ekonomi atau sosial di masa depan bagi pemerintah maupun masyarakat.

**7. Kewajiban**

Kewajiban adalah utang pemerintah yang timbul dari kejadian masa lalu, yang harus diselesaikan di masa depan dan menyebabkan aliran keluar sumber daya ekonomi.

**9. Ekuitas**

Ekuitas adalah selisih antara total aset dan kewajiban pemerintah, yang menunjukkan nilai kekayaan bersih pemerintah untuk mendukung kegiatan operasional atau pengembangan.

**10. Materialitas**

Materialitas mengacu pada pentingnya suatu informasi yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Informasi material harus diungkapkan agar tidak menyebabkan salah pemahaman.

**11. Kebijakan Akuntansi**

Kebijakan akuntansi adalah aturan dan prinsip yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan untuk mengatur perlakuan atas aset, kewajiban, pendapatan, beban, dan metode pengukurannya.

**12. Pendapatan-LRA**

Pendapatan-LRA mencakup penerimaan yang menambah saldo anggaran dalam periode anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

**13. Pendapatan-LO**

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat atau daerah yang diakui sebagai peningkatan ekuitas dalam satu periode laporan.

keuangan menjadi lebih mudah dipahami. Ada beberapa transaksi atau kejadian penting, misalnya kewajiban kontinjensi, yang tidak dapat dicatat dalam laporan utama karena keterbatasan metode pengukuran.

Meskipun begitu, informasi tentang peristiwa tersebut tetap perlu disajikan agar pembaca memahami potensi dampaknya di masa mendatang. Pengungkapan di Catatan atas Laporan Keuangan harus bersifat unik dan tidak mengulangi rincian yang telah ada di laporan utama, seperti rincian persediaan atau aset tetap. Jika ada pengecualian contohnya aset donasi yang tidak dicatat dengan harga perolehan hal ini perlu diungkapkan untuk menjelaskan kebijakan akuntansi yang diterapkan.

Dengan demikian, catatan ini memberikan tambahan informasi yang melengkapi laporan utama, membantu pembaca untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang kondisi keuangan entitas. Selain itu, Catatan atas Laporan Keuangan perlu mengungkapkan informasi penting lainnya yang, jika tidak disampaikan, dapat membuat pembaca salah mengerti laporan tersebut.

Informasi penting ini meliputi peristiwa khusus dalam tahun pelaporan, seperti pergantian manajemen, koreksi kesalahan oleh manajemen baru, komitmen atau kewajiban kontinjensi yang tidak dapat dicatat di neraca, serta perubahan struktur entitas, misalnya penggabungan atau pemekaran. Peristiwa lain yang berdampak sosial, seperti pemogokan yang memerlukan tindakan pemerintah, juga perlu disertakan.

Pengungkapan informasi tambahan ini memberi konteks bagi pembaca tentang kondisi atau perubahan penting yang mempengaruhi posisi keuangan dan kegiatan entitas. Setiap standar akuntansi yang berlaku memuat persyaratan pengungkapan yang harus dipatuhi. Pengungkapan ini bertujuan untuk melengkapi informasi utama di laporan keuangan, sehingga membantu pembaca dalam menafsirkan laporan secara lebih jelas.

## Daftar Pustaka

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2022). *Standar Akuntansi Pemerintahan*.

Presiden Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.

## PROFIL PENULIS



### **Ade Elza Surachman, S.E., Ak., M.Ak.**

Penulis bab "Catatan atas Laporan Keuangan" dalam sebuah buku Akuntansi Pemerintahan Pusat dan Daerah adalah akademisi terampil di bidang akuntansi. Beliau telah mengabdikan diri di dunia akademik selama 9 tahun sejak 2015 sebagai dosen akuntansi, dengan melaksanakan pengajaran seperti Akuntansi Biaya, Akuntansi Manajemen, Akuntansi Keuangan Menengah, serta Pengantar Ilmu Ekonomi dan Manajemen Keuangan.

Lulusan S1 dari Program Studi Akuntansi di Universitas Garut pada tahun 2013, penulis ini melanjutkan pendidikannya dengan meraih gelar master dari Universitas Mercu Buana pada tahun 2015 dan menyelesaikan pendidikan profesi akuntan dalam satu tahun antara 2020 dan 2021 di Universitas Widyatama. Dalam perjalanan karirnya di dunia pendidikan, penulis tidak hanya fokus pada pengajaran tetapi juga secara aktif berkontribusi dalam penelitian dan penerbitan karya buku. Karya yang telah dibuat diantaranya Buku Akuntansi Perusahaan Jasa dan Dagang, Manajemen Keuangan Di Era *Digital*, Manajemen Investasi: Teori dan Praktik, dan Perekonomian Indonesia. Dengan pengalaman luas di bidang pendidikan dan riset serta latar belakang pendidikan yang memadai, penulis bab ini diakui sebagai sumber yang terpercaya dalam bidang Akuntansi. Keahlian dan dedikasinya dalam menyajikan dan menganalisis informasi keuangan menjadikannya sumber yang berharga untuk memberikan wawasan praktis kepada pembaca mengenai analisis laporan keuangan.

Email Penulis: [adeelzasurachman@gmail.com](mailto:adeelzasurachman@gmail.com).



# **BAB 11**

## **AKUNTANSI**

### **KONSTRUKSI DALAM**

#### **PENGERJAAN**

---

**Tuti Meutia, S.E., M.Si.**  
Universitas Samudra



## Definisi Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) merupakan aset tetap yang akan tercantum sebagai salah satu komponen aset tetap jika dilihat pada laporan keuangan. Berbeda dengan aset tetap lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) tidak akan melalui proses penyusutan pada tiap periodenya. Sebaliknya, Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) akan terus menambah nilai dengan pembayaran jangka pendek sebagai kapitalisasi nilai aset.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 08 menurut Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan, aset yang sedang dalam proses pembangunan dan belum selesai disebut sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) mencakup aset tetap seperti tanah, peralatan, mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, serta gedung dan bangunan yang membutuhkan waktu untuk dibangun.

Dalam kebanyakan kasus, pembelian yang dilakukan melalui kontrak konstruksi memerlukan jangka waktu tertentu, yang dapat mencakup kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Aset dapat diperoleh melalui membangun sendiri (swakelola) atau melalui kontrak konstruksi dengan pihak ketiga. Kontrak konstruksi dapat berarti pembelian sejumlah aset yang saling bergantung atau berhubungan dalam hal rancangan, teknologi, fungsi, dan tujuan utamanya.

Menurut Suryanovi (2014) menyatakan bahwa Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah proses pembelian aset tetap yang dimaksudkan untuk digunakan dalam operasi pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang, meskipun pada akhir tahun anggaran belum selesai sepenuhnya.

Kontrak konstruksi dapat mencakup, sesuai dengan pernyataan tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang tercantum pada PSAP Nomor 08:

1. Kontrak untuk perolehan jasa yang terkait langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur.
2. Kontrak untuk pembelian atau pembangunan aset.
3. Kontrak untuk perolehan jasa yang langsung terkait dengan pengawasan aset konstruksi, termasuk manajemen konstruksi dan *value engineering*.

#### 4. Kontrak untuk pembongkaran, penghancuran, atau restorasi aset dan lingkungan setelah penghancuran aset.

Ketentuan-ketentuan dalam standar ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam beberapa kasus, pernyataan ini harus diterapkan pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal, yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama, untuk mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.

Dalam kasus di mana suatu kontrak konstruksi mencakup banyak aset, pembangunan setiap aset akan diperlakukan sebagai kontrak konstruksi yang berbeda apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi:

1. Setiap aset memiliki proposal yang berbeda;
2. Setiap aset dinegosiasikan secara terpisah, dan baik kontraktor maupun pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berkaitan dengan aset tersebut;
3. Biaya masing-masing aset dapat dihitung.

Kontrak dapat mencakup klausul yang memungkinkan pembuatan aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga memungkinkan pembuatan aset tambahan dimasukkan ke dalam kontrak. Jika demikian, konstruksi aset tambahan akan dianggap sebagai kontrak konstruksi terpisah:

1. Aset tambahan ini sangat berbeda dari aset yang tercakup dalam kontrak semula secara signifikan dari segi desain, teknologi, atau fungsinya; atau
2. harga aset tambahan ditetapkan tanpa mempertimbangkan harga kontrak semula.

Ada kalanya kontraktor terdiri dari kontraktor utama dan subkontraktor; misalnya, kontraktor utama membangun gedung secara fisik, sedangkan subkontraktor melakukan pekerjaan mekanikal engineering seperti instalasi listrik, saluran telepon, atau lift.

Namun, kontraktor utama tetap bertanggung jawab atas pekerjaan subkontraktor, dan pemerintah sebagai pemberi kerja

Jika dalam pelaksanaan suatu konstruksi aset tetap dengan cara swakelola (membangun sendiri) terdapat sisa bahan bangunan setelah aset tetap yang dimaksud telah selesai pembangunannya, yang jumlah maupun nilainya bersifat material dan penggunaannya masih dapat dimanfaatkan dalam hal operasional satuan kerja terkait, maka atas barang tersebut perlu disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai komponen persediaan (aset lancar) (Suryanovi, 2014).

Pengungkapan yang perlu dilakukan oleh satuan kerja pada laporan keuangannya dalam hal jenis aset tetap seperti dasar penilaian, rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal serta akhir periode, dan informasi terkait penyusutan aset tetap. Hamzah & Kustiani (2014) menjelaskan terkait pengungkapan yang perlu dilakukan atas aset tetap satuan kerja pada Catatan Atas Laporan Keuangannya (CALK) seperti berikut, yaitu:

1. Dasar penilaian yang digunakan.
2. Informasi mengenai penyusutan yang digunakan.
3. Informasi terkait pertukaran aset tetap, jika hal tersebut ada.
4. Kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan kapitalisasi aset tetap.

Dalam lingkup konstruksi dalam pengerjaan, maka hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) satuan kerja/satuan kerja perangkat daerah antara lain:

1. Rincian terkait kontrak Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) berikut tingkat penyelesaian serta jangka waktu penyelesaiannya pada tanggal neraca;
2. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
3. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan tanggal neraca;
4. Uang muka kerja yang diberikan sampai dengan tanggal neraca;
5. Jumlah Retensi.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan menjelaskan secara sedemikian rupa mengenai ruang lingkup pada kontrak konstruksi yaitu "Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi. Retensi sendiri merupakan persentase dari nilai penyelesaian yang akan digunakan sebagai jaminan akan dilaksanakannya

pemeliharaan oleh kontraktor pada masa yang telah ditentukan dalam kontrak.

Jumlah retensi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Demikian juga halnya dengan sumber dana yang digunakan untuk membiayai aset tersebut. Pencantuman sumber dana dimaksudkan memberi gambaran terkait sumber dana dan penyerapannya sampai tanggal tertentu”. Berikut disajikan contoh penyajian serta pengungkapan terkait konstruksi dalam pengerjaan pada satuan kerja pemerintah:

**Tabel 11.2: Penyajian dan Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)**

UNIVERSITAS ABC NERACA PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022		
URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
<b>Aset</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	XXX
Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	XXX
Kas Lainnya dan Setara Kas	XXX	XXX
Persediaan	XXX	XXX
Aset Tetap		
• Tanah	XXX	XXX
• Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
• Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
• Jalan, Irigasi, dan Jaringan	XXX	XXX
• Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
• <b>Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
• <u>Akumulasi Penyusutan</u>	(XXX)	XXX
Aset Lainnya	XXX	XXX
• Aset Tak Berwujud	XXX	XXX
• <u>Aset Lain-lain</u>	XXX	XXX
• <u>Amortisasi Aset Tak Berwujud</u>	(XXX)	XXX
<b>Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
Kewajiban	XXX	XXX
Ekuitas	XXX	XXX

Sumber: Diolah Penulis.

## Daftar Pustaka

- Hamzah, A. P., & Kustiani, N. A. (2014). *Dasar-Dasar Akuntansi Pemerintahan: Berbasis Akrua*. Penerbit STAN Press.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan Nomor 08 Tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (PMK). (2019). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat*.
- Suryanovi, S. (2014). *Buku Seri Akuntansi Pemerintah Pusat (Buku 2)*.

## PROFIL PENULIS




### **Tuti Meutia, S.E., M.Si.**

Penulis merupakan alumni Sarjana (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala yang lulus tahun 2009. Kemudian pada tahun 2011, penulis kembali melanjutkan pendidikan Master (S2) pada Program Magister Akuntansi Universitas Syiah Kuliah. Penulis merupakan seorang dosen yang dituntut memiliki kepakaran di bidang Akuntansi Keuangan, Akuntansi Pemerintahan dan Akuntansi Syariah, dimana pada implementasinya dalam dunia usaha dunia industri, bidang-bidang tersebut saling mendukung agar dapat meningkatkan kompetensi penulis.

Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya. Beberapa penelitian yang telah dilakukan penulis merupakan dana hibah dari internal perguruan tinggi penulis dan juga kementerian tempat penulis bernaung. Selain penelitian, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi mahasiswa-mahasiswa dan untuk mencerdaskan anak bangsa.

Sebelumnya, penulis juga pernah membuat buku dengan judul *Kumpulan Soal-Soal dan Penyelesaian Pengantar Akuntansi I (Pendekatan Siklus Akuntansi)* serta *Perpajakan (Konsep, Regulasi, dan Penyelesaian Soal)* dan *Book Chapter* berjudul *Ekonomi Mikro Islam Teori dan Analisis, Akuntansi Keuangan, Akuntansi Perusahaan Jasa dan Dagang, Dasar-Dasar Perpajakan serta Sejarah dan Pemikiran Ekonomi Islam* yang penulis gunakan sebagai referensi pada proses belajar mengajar di perguruan tinggi tempat penulis berafiliasi.


Email Penulis: [tuti\\_meutia@unsam.ac.id](mailto:tuti_meutia@unsam.ac.id).



**BAB 12**  
**KEBIJAKAN AKUNTANSI**  
**PERSEDIAAN PEMERINTAH**  
**PUSAT DAN DAERAH**

---

**Rizky Ridwan, S.E., M.Ak.**  
Universitas Cipasung Tasikmalaya



## Pendahuluan

Kebijakan akuntansi persediaan dalam konteks pemerintah pusat dan daerah adalah bagian esensial dari pengelolaan aset yang melibatkan pencatatan, pengukuran, pengakuan, dan penyajian persediaan sebagai aset lancar. Kebijakan ini berfungsi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan, yang merupakan aspek fundamental bagi pengelolaan keuangan publik yang efektif (Sartika et al., n.d.).

Dalam bab ini, akan dibahas setiap poin terkait kebijakan akuntansi persediaan pemerintah pusat dan daerah, dengan mengacu pada sumber-sumber referensi yang relevan serta mencakup studi-studi sebelumnya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif.

## Definisi dan Klasifikasi Persediaan

Persediaan dalam konteks pemerintah pusat dan daerah didefinisikan sebagai aset lancar yang berupa barang atau perlengkapan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, atau barang-barang yang disiapkan untuk diserahkan kepada masyarakat (Nurgiyanti & Martani, 2023). Definisi ini sejalan dengan penelitian oleh Mokodongan dan Wuryaningrat yang menjelaskan bahwa persediaan adalah aset yang mendukung kegiatan operasional, khususnya dalam konteks persediaan obat-obatan yang diakui berdasarkan PSAP No. 05 (Mokodongan & Wuryaningrat, 2023; Subadriyah, 2017).

Persediaan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, seperti barang operasional (misalnya alat tulis kantor), bahan baku untuk produksi, barang dalam proses produksi, dan barang jadi yang akan dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Persediaan juga dapat berupa barang yang disimpan untuk tujuan berjaga-jaga dalam mendukung kegiatan pelayanan masyarakat. Selain itu, persediaan juga dapat mencakup barang-barang yang rusak atau usang, yang perlu diungkapkan secara terpisah untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi persediaan yang dimiliki.

Klasifikasi ini memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi jenis dan tujuan penggunaan persediaan, yang

## Contoh Tabel Penyajian Persediaan Pemerintahan

Berikut adalah contoh tabel penyajian persediaan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang disajikan sebagai bagian dari aset lancar:

**Tabel 12.1: Penyajian Persediaan Pemerintahan**

Jenis Persediaan	Jumlah Unit	Nilai Per Unit (Rp)	Total Nilai (Rp)	Kondisi
Alat Tulis Kantor	1,000	5,000	5,000,000	Baik
Obat-Obatan	500	10,000	5,000,000	Baik
Bahan Makanan	300	20,000	6,000,000	Baik
Alat Kesehatan (Rusak)	50	15,000	750,000	Rusak
Pupuk Pertanian	200	25,000	5,000,000	Baik

Sumber: Diolah Penulis.

Tabel ini menunjukkan informasi mengenai jenis persediaan, jumlah unit, nilai per unit, total nilai, dan kondisi barang. Informasi ini penting untuk memastikan bahwa aset pemerintah dicatat dan disajikan secara akurat, sehingga dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

## Kebijakan Akuntansi Persediaan Berdasarkan PSAP Nomor 05

PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan menjelaskan bahwa persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat (mokodongan & Wuryaningrat, 2023). Persediaan dapat berupa:

1. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah. Seperti barang pakai habis (contoh: alat tulis kantor), barang tak habis pakai (contoh: komponen peralatan dan pipa), dan barang bekas pakai (contoh: komponen bekas).

kekurangan atau kelebihan persediaan. Selain itu, kebijakan yang jelas juga memudahkan dalam melakukan audit dan pemeriksaan oleh pihak eksternal, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan pemerintah.

Sebagai contoh, penerapan kebijakan pencatatan persediaan secara akrual memungkinkan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi persediaan yang sudah kadaluarsa dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghindari pemborosan anggaran. Hal ini juga membantu dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, yang penting bagi kepercayaan publik.

Secara keseluruhan, kebijakan akuntansi persediaan yang diterapkan di pemerintah pusat dan daerah harus berdasarkan standar yang jelas dan dukungan sistem informasi yang efektif untuk mencapai tujuan transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan persediaan yang baik tidak hanya meningkatkan kualitas laporan keuangan, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pengelolaan sumber daya pemerintah.

Dengan menerapkan kebijakan yang terstandar, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan persediaan serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Ansar, R., Syahdan, R., & Seber, I. S. (2022). Kompetensi Sumberdaya Manusia Memoderasi Hubungan Pemahaman Sap Dan Penerapan Sia. In *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis* (Vol. 15, Issue 1). <https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/>.
- Christensen, T., Lise Fimreite, A., & Læg Reid, P. (2007). Reform Of The Employment And Welfare Administrations-The Challenges Of Co-ordinating Diverse Public Organizations. *International Review Of Administrative Sciences*, 73(3), 389-408. <https://doi.org/10.1177/0020852307081149>.
- Durose, C., & Rummery, K. (2006). Governance And Collaboration: Review Article. *Social Policy And Society*, 5(2), 315-321. <https://doi.org/10.1017/S147474640500299x>.
- Kristen, U., Wacana, S., & Basmar, E. (2024). *Ekonomi Moneter*. <https://www.researchgate.net/publication/381776611>.
- Mokodongan, Hizkia, & Wuryaningrat, N. (2023). Penerapan Akuntansi Persediaan Obat-Obatan Berdasarkan Psap No.05 Pada Rumah Sakit Umum Daerah Noongan. *Jurnal Akuntansi Manado (Jaim)*, 3(2), 252-260. <https://doi.org/10.53682/jaim.v3i2.2682>.
- Nurgiyanti, N., & Martani, D. (2023). Evaluasi Penyelenggaraan Akuntansi Persediaan Hadiah: Studi Kasus Pada Kementerian Sosial. *Jurnal Akuntansi Manado (Jaim)*, 225-240. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.6446>.
- Nurul Ismail Hasan, S. A. R. R. (2024). Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Neraca Peradaban*, 4(3). <https://doi.org/https://journal-stiehidayatullah.ac.id/index.php/neraca/article/view/518>.
- Paulsson, G. (2006). Accrual Accounting In The Public Sector: Experiences From The Central Government In Sweden. *Financial Accountability And Management*, 22(1), 47-62. <https://doi.org/10.1111/j.0267-4424.2006.00392.x>.
- Sartika, D., Rizky Ridwan, A., & Paskanova Christi Gainau, Ma. (N.D.). *Akuntansi Sektor Publik Penerbit CV. Eureka Media Aksara*.
- Subadriyah. (2017). Flypaper Effect: Sebelum Dan Sesudah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Akruial. *Jurnal Akuntansi*

*Multiparadigma*, 8(83).  
<https://doi.org/10.18202/jamal.2017.12.7073>.

Tombuku, T., & Manaroinsong, J. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Persediaan Barang Habis Pakai Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Akuntansi Manado (Jaim)*, 3(2), 149–156. <https://doi.org/10.53682/jaim.V3i2.2185>.

## PROFIL PENULIS




### **Rizky Ridwan, S.E., M.Ak.**

Penulis lahir di Tasikmalaya, 16 Juli 1994, telah mencapai prestasi gemilang dan kini menjadi dosen tetap di Program Studi Akuntansi, Konsentrasi Akuntansi Sektor Publik di Universitas Cipasung Tasikmalaya. Gelar S1 diperoleh dari Universitas Siliwangi dan S2 dari Universitas Widyatama, menunjukkan jejak intelektualnya yang kokoh. Dengan keahlian di akuntansi sektor publik, penulis aktif dalam pengajaran, riset, dan publikasi ilmiah. Dedikasinya tercermin dalam motivasinya yang tinggi, memberikan ilmu dan pengalaman kepada mahasiswa dan rekan sejawat. Penulis juga telah berhasil mendapatkan beberapa dana hibah penelitian dan pengabdian dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), yang memungkinkan penulis untuk memperluas penelitian dan meningkatkan dampak pengabdian kepada masyarakat.

Keberhasilan ini menunjukkan kemampuan penulis dalam bersaing di tingkat nasional dan dedikasi untuk terus berkontribusi dalam dunia akademik. Keberhasilannya adalah hasil dari semangat tak kenal menyerah dan komitmen pada pendidikan, membawa dampak positif dalam komunitas akademis, membentuk generasi penerus yang berkualitas. Dengan pengetahuannya yang mendalam, penulis tidak hanya mengajar, tetapi juga mendorong pertumbuhan intelektual dalam komunitas akademisnya, menjadikannya pilar inspiratif dalam dunia pendidikan tinggi.

Email Penulis: rizkyridwan@uncip.ac.id.



**BAB 13**  
**ANALISIS PENGUKURAN**  
**KINERJA KEUANGAN**  
**PEMERINTAH**

---

**Agus Kurniawan, S.E., M.S.Ak.**  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



## Pendahuluan

Pengelolaan keuangan pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan suatu negara. Keuangan publik yang efisien dan akuntabel akan mendukung tercapainya berbagai program pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Dalam konteks ini, pengukuran kinerja keuangan pemerintah menjadi salah satu instrumen vital yang digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah berhasil mengelola sumber daya keuangan yang tersedia. Dengan adanya pengukuran kinerja, pemerintah dapat mengevaluasi efektivitas alokasi anggaran dan pencapaian tujuan pembangunan secara lebih objektif (Mardiasmo, 2009).

Keuangan negara seringkali menjadi sorotan publik karena dampaknya yang langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengukuran kinerja keuangan yang tepat memungkinkan pemangku kebijakan untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan atau penguatan dalam pengelolaan keuangan.

Hal ini, pada gilirannya, akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah dalam penggunaan anggaran negara, serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat (Gustafsson & Jacobsson, 2015). Oleh karena itu, studi tentang pengukuran kinerja keuangan pemerintah sangat relevan untuk membahas tantangan dan dinamika pengelolaan keuangan publik.

Selain itu, kinerja keuangan pemerintah juga merupakan bagian dari upaya untuk memenuhi prinsip-prinsip *good governance*, di mana pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien sangat diperlukan dalam menghadapi tuntutan pembangunan yang terus berkembang. Pemerintah yang tidak mampu mengelola anggaran secara optimal akan menghadapi risiko ketidakstabilan fiskal, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik dan kredibilitas negara di mata dunia internasional (Shah, 2007).

Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana pengukuran kinerja keuangan dilakukan dan tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut. Keberhasilan pengukuran kinerja keuangan juga sangat dipengaruhi oleh sistem penganggaran yang diterapkan. Pendekatan anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) menjadi salah satu solusi yang berkembang untuk menghubungkan

## Tantangan Dalam Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah

Salah satu tantangan utama dalam pengukuran kinerja keuangan pemerintah adalah masalah yang berkaitan dengan data dan sumber data. Pengukuran kinerja yang efektif sangat bergantung pada data yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Namun, sering kali data yang diperlukan untuk analisis kinerja keuangan tidak tersedia atau tidak lengkap.

Masalah ini dapat timbul karena berbagai alasan, termasuk keterbatasan dalam sistem pengumpulan data, kesalahan dalam pencatatan, atau ketidakmampuan untuk mengakses data yang dibutuhkan secara *real-time* (Shah, 2007). Ketidakakuratan dan keterlambatan dalam penyediaan data keuangan dapat menghambat proses pengukuran kinerja dan pengambilan keputusan yang tepat.

Misalnya, data yang terlambat atau tidak sesuai dapat menyebabkan keputusan yang tidak relevan atau tidak berdasarkan bukti yang akurat. Selain itu, kesalahan dalam pencatatan anggaran, seperti pengeluaran yang tidak tercatat atau salah klasifikasi, dapat mengarah pada kesimpulan yang salah mengenai kinerja keuangan suatu pemerintah daerah atau negara (OECD, 2013).

Selain itu, tantangan lain adalah kurangnya keterbukaan data yang seringkali menjadi hambatan dalam pengelolaan kinerja keuangan pemerintah. Pemerintah kadang-kadang tidak menyediakan akses yang cukup terhadap data yang diperlukan untuk melakukan analisis yang transparan dan akuntabel. Ketidaktransparanan ini dapat membatasi kemampuan masyarakat atau pihak lain untuk memantau dan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah secara efektif (Robinson, 2007).

Keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dalam pengelolaan data juga merupakan faktor yang memperburuk masalah ini. Pengelolaan data keuangan yang baik memerlukan tenaga ahli yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang sistem informasi keuangan, akuntansi sektor publik, dan analisis data. Tanpa keahlian yang memadai, data yang dikumpulkan mungkin tidak diolah dengan cara yang benar, yang pada gilirannya dapat mengurangi efektivitas pengukuran kinerja keuangan pemerintah (Mardiasmo, 2009).

Lebih jauh lagi, pengukuran kinerja keuangan pemerintah sering kali memerlukan penggabungan berbagai jenis data yang tersebar di berbagai lembaga atau unit pemerintahan. Proses penggabungan dan konsolidasi data ini bisa menjadi sangat rumit dan rentan terhadap kesalahan. Ketidakmampuan untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber dapat menyebabkan ketidakcocokan informasi yang digunakan dalam proses pengukuran (Tayong & Tanyi, 2017).

Selain itu, masalah data juga terkait dengan ketidakpastian dalam pengukuran hasil dari berbagai program atau kebijakan. Misalnya, data tentang hasil kebijakan pemerintah dalam pengurangan kemiskinan atau peningkatan kualitas pendidikan seringkali bersifat kualitatif dan sulit untuk diukur secara kuantitatif. Hal ini dapat menyulitkan proses pengukuran kinerja yang efektif, yang idealnya membutuhkan data yang terukur dan konsisten (Shah, 2007).

Untuk mengatasi masalah ini, banyak pemerintah yang kini mengembangkan sistem integrasi data keuangan yang lebih canggih dan berbasis teknologi. Sistem ini memungkinkan pengumpulan dan analisis data keuangan yang lebih cepat dan lebih efisien. Namun, hal ini memerlukan investasi yang besar dalam teknologi informasi serta pelatihan sumber daya manusia yang memadai untuk memanfaatkannya secara optimal (OECD, 2013).

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Gustafsson, B., & Jacobsson, B. (2015). *Public Sector Financial Management and Accountability*. OECD Publishing.
- Klitgaard, R. (1998). *International Cooperation against Corruption*. The World Bank.
- Mardiasmo, D. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- OECD (2013). *Public Governance and Performance Management*. OECD Publishing.
- Robinson, M. (2007). *Performance-Based Budgeting*. *Public Administration Review*, 67(5), 873-883.
- Shah, A. (2007). *Budgeting and Financial Management in the Public Sector*. SAGE Publications.
- Tayong, D., & Tanyi, D. (2017). *Public Sector Financial Management: Challenges and Solutions*. *International Journal of Public Administration*, 40(10), 823-832.

## PROFIL PENULIS



### **Agus Kurniawan, S.E., M.S.Ak.**

Agus Kurniawan, M.S.Ak., adalah seorang akademisi yang berfokus pada studi Akuntansi. Pendidikan formalnya dimulai dengan menyelesaikan gelar S1 di Universitas Lampung pada tahun 2003, diikuti dengan gelar S2 pada tahun 2013 di kampus Universitas Lampung. Dedikasi beliau dalam memperdalam pengetahuan dan pemahaman Islam serta ekonomi akuntansi memberikan kontribusi yang berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Email Penulis: [agk2612@gmail.com](mailto:agk2612@gmail.com).

# AKUNTANSI PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH

Buku *Akuntansi Pemerintahan Pusat dan Daerah* merupakan panduan komprehensif yang membahas secara mendalam konsep, prinsip, dan praktik akuntansi yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Buku ini dirancang untuk membantu pembaca memahami mekanisme pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan keuangan di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Melalui pembahasan yang sistematis, buku ini menguraikan topik penting seperti konsep dasar akuntansi pemerintahan, tujuan, prinsip, dan contoh akuntansi pemerintah, standar akuntansi, sistem akuntansi, penyusunan laporan keuangan, pendapatan belanja, pengelolaan APBN dan APBD, laporan keuangan BLU dan arus kas operasional, catatan atas laporan keuangan, akuntansi konstruksi, kebijakan akuntansi persediaan, serta pengukuran kinerja keuangan pemerintah pusat dan daerah. Pembaca juga diajak untuk memahami pentingnya harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami dan didukung oleh referensi terkini, buku ini sangat cocok digunakan oleh mahasiswa, praktisi akuntansi, aparatur sipil negara, dan siapa saja yang ingin mendalami akuntansi pemerintahan. Dengan pendekatan yang teoritis sekaligus praktis, buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan utama dalam memahami tata kelola keuangan pemerintah yang profesional dan bertanggung jawab.